



**PERLINDUNGAN KORBAN  
DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh**

**LUBIS, SH**

**NIM: B4A.000249**

**Bidang Kajian: Sistem Peradilan Pidana**

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003.**

# **PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Disusun oleh**

**L U B I S, SH  
NIM : B4A. 000249  
Bidang Kajian : Sistem Peradilan Pidana**

**Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 3 Januari 2003**

**Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**

**Semarang, Januari 2003**

**Pembimbing,**



**PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.  
NIP. 130 350 519**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro Semarang,**



**PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.  
NIP. 130 350 519**

## MOTTO

Jadilah umat yang terbaik dengan jalan selalu berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan, dan mencegah pada kemungkankaran. (disarikan dari Al Qur'an)

Jika ingin menjadi orang yang mulia maka carilah kemuliaan disisi Tuhanmu niscaya kau akan memperoleh kemuliaan disisi manusia.

Jika ingin memperoleh kebahagiaan di dunia maka capailah dengan ilmu, jika ingin memperoleh kebahagiaan di akherat maka capailah dengan ilmu dan jika ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akherat capailah dengan ilmu. ( Al Hadits)

Kupersembahkan tulisan ini untuk orang-orang yang peduli terhadap penderitaan orang lain serta orang-orang yang suka berlaku adil dan selalu memperjuangkan keadilan.

## ABSTRAK

KUHP yang sekarang berlaku adalah KUHP peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang mempunyai falsafah dan pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Disamping itu karena usia KUHP yang sudah cukup lama menyebabkan perlu diadakan pembaharuan atau perubahan kembali. Perubahan atau pembaharuan KUHP ini tidak terlepas dari upaya pembentukan sistem hukum nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mencegah dan atau menanggulangi terjadinya kejahatan

Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan hukum pidana nasional sekarang dan untuk masa yang akan datang adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap para korban kejahatan. Selama ini yang menjadi perhatian adalah perlindungan masyarakat serta bagaimana membina dan memperbaiki si pelaku kejahatan sedangkan korban kejahatan tetap mengalami penderitaan tanpa memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam penegakan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan yaitu dengan mempelajari kebijakan hukum baik kebijakan formulasi maupun kebijakan aplikatif dengan menggunakan data kepustakaan serta primer berupa hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan dengan para korban kejahatan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP yang berlaku sekarang belum memberikan perhatian pada korban kejahatan dan masih terlalu besar memberikan perhatian pada pelaku kejahatan sementara itu ketentuan-ketentuan pidana Khusus diluar KUHP telah mulai memberikan perhatian pada kepentingan korban kejahatan dengan mencantumkan ganti sebagai salah satu pidana.

Karena lemahnya kebijakan formulasi dalam KUHP sekarang menyebabkan kebijakan aplikatif tidak atau kurang memberikan perhatian pada perlindungan kepentingan korban berupa perintah untuk memberikan ganti rugi pada korban kejahatan.

Besarnya perhatian dari ilmuwan hukum pidana serta masyarakat terhadap perlindungan korban kejahatan harus menjadi landasan pemikiran untuk memberikan perhatian terhadap korban dalam pembentukan hukum pidana yang akan datang dengan cara memperluas kemungkinan untuk memperoleh ganti rugi baik dari pelaku maupun dari negara serta perlunya pengaturan hak-hak dari korban kejahatan.

Guna melindungi kepentingan korban saat sekarang perlu diadakan perubahan KUHP secara parsial yaitu mengadakan perubahan terhadap pasal 10 KUHP dengan menambahkan ganti rugi pada korban sebagai salah satu jenis pidana serta penggunaan pidana denda sebagai ganti kerugian kepada korban.

## ABSTRACT

Criminal Code which is still valid now is the criminal code inheritance from Netherlands East Indies government which has different ideology and philosophy from Indonesian. Besides, because of the age of those Criminal Code is old enough caused need to create renewal or regeneration one. The renewal or regeneration of Criminal Code is not apart from the obtain to establish national system law in order to realize the prosperous life of society with the way to prevent and or to cope with the crime outcome.

One of the factors which is need to have pay attention on the present and future national criminal law policy is the problem which is related is to the protection of crime victims. Up till now the attention in the form society protection and how to establish and improve the crime whereas the victims still feel suffer without having right to get protection on criminal law enforcement.

This research is using policy approaches that is, by studying law policy both formulation policy or applicative policy by using the literature data and primary data in the form of interview results with official of law enforcement and the crime victims then analized by using qualitative analizes method.

The research fundings shows that the valid Criminal Code now has not paid attention to crime victims yet meanwhile the special criminal reguations outer part of Criminal Code has began to pay much attention to the crime victims by including the restitution as one of criminal type.

Because of the weekness of formulation policy on valid Criminal Code now caused the applicative policy has not or less paid attention to protection need of crime victim in the form of order to give compensation to crime victims.

Huge attention are given by criminal law scholar and society to the prevention of crime victims must be an idiology to pay attention to the victims on creating the next criminal law with the way to extend the chance of having compensation both from crime and country and the need to arrange the rights of crime victims.

For protecting the crime victims needs, righ now is needed to make a renewal Criminal Code partialy or renewal the section 10 of Criminal Code by adding the compensation to victims as one the criminal types and the implementation of fine as the compensation to the victims.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA" ini.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar magister dibidang ilmu hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada Prof. Dr Barda Nawawi Arief, SH yang dengan susah payah serta penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada :

1. Bapak Prof. Ir Eko Budihardjo, MSc. Selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr dr Suharjo Hadisaputro, selaku direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Paulus Hadisuprpto, SH. MH. Selaku anggota team penguji.
4. Bapak Eko soponyono, SH, MH. Selaku anggota team penguji.
5. Seluruh Guru Besar dan dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister-Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

6. Bapak Budiharto, SH. MS. Selaku sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh staf Administrasi Akademik.
7. Bapak Eko Sabar,SH. MS. Selaku kepala Bagian Keuangan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro beserta staf Bagian Keuangan.
8. Bapak Dekan serta Pembantu-pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
9. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima di Bima, ketua Pengadilan Negeri Mataram di Mataram serta ketua Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah.
10. Ayahanda dan ibunda tercinta Husen Saleh dan Siti Hadijah serta isteri dan anak-anak tersayang.
11. Semua pihak yangtelah banyak membantu penulis selama mengikuti kuliah sampai akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Mudah-mudahan sumbangan pemikiran dan tenaga yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan sangat diharapkan untuk kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tesis ini memberi manfaat bagi para pembacanya.

Semarang, September 2001

Penulis,

LUBIS

NIM: B4A.000249



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah putusan dan jumlah pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tahun 1998 s/d tahun 2000.....hal.100

Tabel 2. Jumlah putusan dan jumlah pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Praya tahun 1998 s/d tahun 2000 .....hal. 100

Tabel 3. Jumlah putusan dan jumlah pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima tahun 1998 s/d tahun 2000 .....hal. 101

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persembahan .....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar tabel.....	viii
Daftara Isi .....	ix

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Penelitian .....	1
	B. Perumusan Masalah .....	12
	C. Tujuan Penelitian .....	13
	D. Kegunaan Penelitian .....	13
	E. Kerangka Pemikiran .....	14
	F. Metode Penelitian .....	26
	1. Metode Pendekatan .....	26
	2. Metode Pengumpulan Data .....	27
	3. Metode Analisis Data .....	28
	G. Sistematika Penulisan .....	29
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	30
	A. Pengertian Korban dan Perlindungan Korban .....	30
	1. Pengertian Korban .....	30
	2. Perlindungan Korban .....	38
	B. Pentingnya Perlindungan Korban dalam Penegakan Hukum Pidana .....	41
	C. Perkembangan Perhatian Terhadap Perlindungan Korban ...	54
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
	A. Formulasi Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia .....	73
	B. Pelaksanaan Perlindungan Korban dalam Penerapan Hukum Pidana .....	100
	C. Prospek Pengaturan Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Indonesia .....	121
BAB IV	PENUTUP.....	149
	A. Kesimpulan .....	149
	B. Saran-saran .....	152

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu bangsa yang merdeka tidak saja harus terlepas dari penjajahan secara politik dari bangsa asing tetapi juga harus mampu membebaskan diri dari penggunaan instrumen-instrumen politik bangsa asing tersebut dan salah satu instrumen politik tersebut adalah peraturan-peraturan hukum. Suatu kemerdekaan belum mempunyai arti yang sesungguhnya jika suatu bangsa masih menggunakan instrumen-instrumen politik dari negara lain yang tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian sendiri. Penjajahan pada hakekatnya merupakan bentuk-bentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang lain.<sup>1</sup>

Proses pembangunan sekarang ini merupakan usaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang berusaha untuk tetap menguasai bangsa Indonesia baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Salah satu aspek dari pembangunan itu adalah pembangunan dibidang hukum.

Semua perencanaan pembangunan hukum bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*; Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang; 2000, hal. 9

sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta memberikan patokan, pengarah dan dorongan dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan, bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa itu.<sup>2</sup>

Pancasila yang telah diterima sebagai dasar negara harus dijadikan dasar atau kerangka acuan dalam setiap usaha mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk sebagai dasar dalam setiap usaha pembangunan dan pembentukan hukum nasional sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Dengan demikian hukum yang diciptakan itu merupakan cerminan dari falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan kata lain pengaturan dalam hukum termasuk juga dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar), Pusat Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1974, hal. 2

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 63.

Pada saat-saat sekarang ini sedang hangat dibicarakan masalah pembaharuan hukum pidana nasional terutama menyangkut pembentukan KUHP nasional untuk menggantikan KUHP (WvS) peninggalan pemerintahan kolonial yang diberlakukan sejak proklamasi kemerdekaan dengan maksud untuk menjaga kekosongan hukum setelah Indonesia menyatakan diri sebagai suatu negara merdeka. Pembentukan KUHP nasional untuk menggantikan KUHP (WvS) yang kini berlaku menjadi sangat mendesak karena disadari bahwa setelah lebih dari lima puluh tahun Indonesia merdeka masih menggunakan hukum pidana yang diciptakan oleh bangsa lain yang mempunyai falsafah dan pandangan hidup yang berbeda dengan falsafah dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Dalam rangka pembentukan KUHP nasional baik dalam menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana maupun dalam rangka menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus difahami bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dengan sarana hukum pidana yaitu dengan jalan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>4</sup>, Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social-welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan,

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 1996, hal. 2.

bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Dalam rangka perubahan atau pembaharuan KUHP, Sudarto mengemukakan adanya tiga alasan urgensi diperbaharunya KUHP<sup>5</sup> yaitu: alasan politik, sosiologis dan alasan praktis (kebutuhan dalam praktek). Dipandang dari sudut politik, Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka adalah wajar mempunyai KUHP sendiri. KUHP yang diciptakan oleh bangsa sendiri bisa dipandang sebagai lambang dan merupakan kebanggaan dari bangsa yang bersangkutan yang telah mampu melepaskan diri dari pengaruh negara penjajah. KUHP dari suatu negara yang “dipaksakan” untuk diperlakukan di negara lain, bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Dipandang dari sudut sosiologis bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan budaya dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Dipandang dari sudut praktek sehari-hari, tidak banyak orang menyadari sekarang ini, bahwa teks resmi dari KUHP kita adalah tetap teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum dalam KUHP yang disusun oleh Moeljatno, oleh R. Soesilo dan lain-lain itu merupakan terjemahan “partikelir” dan bukan terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang.

---

<sup>5</sup> Sudarto, Op-cit, hal.66-68

Sementara itu Muladi mengatakan<sup>6</sup> bahwa kajian yang komprehensif tak kalah pentingnya adalah alasan adaptif, yaitu KUHP nasional di masa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat yang beradab.

Alasan adaptif seperti yang dikemukakan oleh Muladi di atas memang tidak dikesampingkan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana kita dan harus menjadi perhatian oleh karena perkembangan pemikiran tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan semakin banyak mendapat perhatian dunia internasional. Salah satu aspek yang mendapat perhatian internasional adalah menyangkut perhatian dan perlindungan korban kejahatan. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam sidang umum PBB tanggal 15 Desember 1985 telah diterima resolusi tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Dalam Pasal 6. deklarasi tersebut dinyatakan bahwa: *The responsiveness of judicial and administrative processes to the needs of victims should be facilitated by:*

- a. ....
- b. *Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interest and consistent with the relevant national criminal justice system*<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang 24 Pebruari 1990, hal. 3

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief: *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal.85-86.-

Selanjutnya dalam upaya pencegahan kejahatan harus dilakukan secara terpadu atau secara integral/sistemik yang antara lain menurut Barda Nawawi Arief<sup>8</sup> adalah keterpaduan antara *"treatment of offenders"* dan *treatment of the victim*" yang dalam Kongres PBB ke-7 dikatakan *"Victim's right should be perceived as an integral part/aspect of the total criminal justice system"*.

Perkembangan global sekarang ini mengharuskan kita untuk tetap memberikan perhatian pada penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana yang berorientasi pada si pelaku kejahatan pada satu pihak dan pada diri korban kejahatan pada pihak lainnya.

Adalah suatu hal yang tidak adil jika penegakan hukum pidana hanya memberikan perhatian pada si pelaku kejahatan (*offenders*) sementara orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari suatu kejahatan tidak atau kurang mendapat perhatian. Hal ini akan bertentangan dengan tujuan dari diadakannya atau diciptakannya aturan hukum pidana yang bermaksud untuk memberikan perlindungan pada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Jika rumusan delik yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana dimaksudkan untuk menjelaskan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan yang jika dilanggar akan dikenai sanksi pidana dan hal itu dilakukan untuk perlindungan masyarakat, maka sudah seharusnya apabila setelah terjadi suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian pada salah satu anggota masyarakat, hukum pidana masih terus memberikan perlindungannya

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hal 83.



dengan cara mengatur pemberian ganti rugi atau pemulihan hak-hak masyarakat (korban) yang telah dirusak oleh adanya suatu kejahatan.

Sebagai bahan perbandingan, masalah perlindungan korban dikenal pula dalam hukum Islam yaitu berupa pemberian ganti rugi pada keluarga korban yang di dalam Islam dikenal dengan pembayaran *Diyat* sebagai ganti hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang tidak disengaja dengan syarat keluarga korban mau menerima *Diyat* serta memberikan maaf pada si pelaku. Hal ini terlihat antara lain dalam surat Al Baqarah ayat 177 yang artinya “ *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (Diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih*”.

Dari ayat Al Qur'an tersebut di atas terlihat bahwa pemberian ganti kerugian kepada keluarga korban merupakan keharusan dalam hukum Islam sepanjang keluarga korban memberi maaf pada pelaku kejahatan (pembunuhan yang tidak disengaja). Sistem hukum Islam yang secara konseptual memberikan perhatian pada kepentingan korban atau ahli warisnya dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu hukum pidana maupun dalam pembentukan KUHP nasional yang baru. Dalam pengembangan ilmu

hukum pidana saat ini, pendidikan tinggi hukum menghadapi tugas ganda yang “dilematis”. Di satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan “pendidikan hukum profesional” (*“profesional law education”*) yang dapat menghasilkan sarjana hukum profesional yang memiliki kemampuan dan kemahiran/keterampilan hukum dalam menguasai hukum positif, tetapi dilain pihak dituntut pula mengembangkan tugas keilmuan dan tugas nasional untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum nasional.<sup>9</sup> Artinya secara ilmiah tidak ada keberatan untuk merujuk pada pidana Islam karena dapat menjadi alternatif pemikiran dalam usaha memberikan perlindungan korban atau keluarganya.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang ini tidak ditemui adanya pengaturan tentang pemberian ganti rugi pada korban kejahatan baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya pemberian ganti rugi pada korban atau keluarganya hanya ada apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat dan dalam putusan hakim tersebut dicantumkan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai salah satu syarat yang harus dilaksanakan oleh terpidana.

Kemungkinan lain untuk memperoleh ganti kerugian bagi korban atau keluarganya dalam penegakan hukum pidana adalah dengan mengajukan permohonan penggabungan ganti kerugian kedalam proses pemeriksaan perkara pidana atau kalau terjadi salah tangkap atau salah tahan oleh aparat

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 10.

penegakan hukum, maka korban atau keluarganya dapat mengajukan permohonan pemberian ganti rugi melalui proses praperadilan.

Pengaturan pemberian ganti rugi yang sangat sederhana baik dalam KUHP maupun dalam KUHP yang berlaku sekarang menunjukkan tidak ada atau kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap korban yang telah menderita sebagai akibat dari adanya suatu kejahatan.

Dibandingkan dengan di negara-negara lain, pengaturan pemberian ganti rugi kepada korban memang dapat dikatakan masih sangat ketinggalan. Tetapi untuk pengaturan pemberian ganti rugi dalam perundang-undangan di luar KUHP telah ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganti rugi kepada korban sebagai pidana tambahan ataupun sebagai salah satu tindakan tata tertib yang harus dilakukan oleh terpidana.

Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan hukum pidana pada umumnya dan pembentukan KUHP nasional khususnya, masalah perlindungan korban terutama yang menyangkut pemberian ganti rugi kepada korban perlu mendapat perhatian yang sewajarnya. Dengan memberikan perhatian yang besar kepada korban kejahatan maka akan meminimalkan kemungkinan terjadinya korban kedua kali (*victim secondary*) bagi seseorang. Selain dari itu dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada korban kejahatan maka sesungguhnya hukum pidana telah ikut membantu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan jalan meminimalkan penderitaan para korban kejahatan.

Dalam konsep KUHP nasional yang baru terlihat adanya kemajuan dalam memberikan perlindungan dan perhatian kepada korban kejahatan yaitu dengan diaturnya pemberian ganti rugi untuk korban. Jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang yang tidak memasukan pemberian ganti rugi pada korban sebagai salah satu jenis pidana baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan, maka dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2000 terlihat adanya pengaturan pemberian ganti rugi pada korban sebagai salah satu pidana meskipun masih bersifat pidana tambahan.

Mengingat pentingnya memberikan perhatian pada korban kejahatan, maka dalam rangka pembentukan KUHP Nasional, memang masalah perlindungan pada korban kejahatan perlu pengaturan yang memadai untuk membantu memulihkan kondisi sosial ekonomi para korban kejahatan serta untuk dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana serta untuk memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam penjatuhan pidana seperti yang tercantum dalam Konsep KUHP tahun 2000.

Perhatian pada perlindungan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan disatu sisi dan disisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah pembinaannya karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang

diakibatkan oleh kejahatannya.<sup>10</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan santunan kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku.

Dari sudut pandang masyarakat, penjatuhan pidana serupa ini juga akan menanamkan kesan bahwa pelaku bukan saja telah dijatuhi pidana tetapi juga telah membayar "untungnya" dalam bentuk perbuatan baik terhadap korbannya. Kesan seperti ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran pelaku tersebut di tengah-tengah masyarakat. Sikap masyarakat seperti ini pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri si pelaku kejahatan sebagai salah satu syarat dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik dikemudian hari.

Dengan demikian penjatuhan pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku tetapi sebaliknya mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku apalagi pidana yang dijatuhkan yang berupa pemulihan hak-hak korban kejahatan dapat dipertimbangkan untuk meniadakan penjatuhan pidana penjara pendek.

Dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait di dalamnya yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) dan pihak korban kejahatan (*victims*). Oleh karena itu maka kedua pihak tersebut harus mendapat perhatian seimbang. Dengan kerangka pemikiran yang demikian maka dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak

---

<sup>10</sup> Andi Mattalatta, dalam J.E. Sahatapy: *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 43

yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan formulasi dalam hukum pidana positif saat ini telah mencerminkan adanya perlindungan terhadap korban kejahatan.
2. Bagaimanakah kebijakan aplikatif sistem peradilan pidana dalam mewujudkan pemberian ganti rugi pada korban kejahatan.
3. Bagaimana prospek pengaturan perlindungan korban kejahatan dalam hukum pidana yang akan datang.

Untuk menghindari terjadinya pembiasan dalam penelitian ini, maka permasalahan tersebut di atas perlu diberi batasan-batasan sebagai berikut:

Permasalahan pertama dalam penelitian ini akan ditekankan pada penelitian yang bersifat normatif yaitu dengan meneliti tentang peraturan perundang-undangan pidana positif yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban kejahatan. Di samping itu akan diteliti bagaimana hubungan kebijakan formulasi yang ada sekarang dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Dengan demikian yang diteliti bukan saja ketentuan yang ada dalam KUHP tetapi juga ketentuan-ketentuan lain yang ada di luar KUHP.

Permasalahan kedua, penelitian akan ditekankan pada praktek penegakan hukum khususnya terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana berupa perintah pemberian ganti rugi untuk korban kejahatan.

Permasalahan ketiga akan ditekankan pada masalah-masalah yang menyangkut pengaturan perlindungan korban dimasa yang akan datang baik dalam kebijakan kriminalisasi (penentuan perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) maupun dalam penentuan pidana.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui kebijakan formulasi/legislatif dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam hukum pidana positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah dalam penegakan hukum pidana telah memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan pada korban kejahatan.
3. Untuk mengetahui prospek pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam hukum pidana nasional dimasa yang akan datang:

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya untuk menambah

referensi tentang perlindungan korban kejahatan dalam penegakan hukum pidana

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi para perancang KUHP nasional serta bagi para anggota legislatif dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional. Di samping itu penelitian ini diharapkan berguna juga bagi praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan usaha-usaha memberikan perlindungan pada korban kejahatan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perubahan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia terutama hukum pidana materil (substantif) merupakan hal yang penting dan mendasar karena hukum pidana (KUHP) yang berlaku sekarang merupakan hukum pidana peninggalan jaman kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Indonesia yang sudah lebih dari lima puluh tahun merdeka. Di samping itu KUHP yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Pembaharuan hukum yang dilakukan itu sudah barang tentu harus sejalan dengan politik hukum bangsa Indonesia dan tujuannya tidak bisa dilepaskan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi bangsa



Indonesia dari segala tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Hakekat dari pembaharuan hukum pidana, jika dilihat dari sudut pendekatan kebijakan maka menurut Barda Nawawi Arief mengandung pengertian<sup>11</sup>;

- a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya perlindungan masyarakat).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Dengan kebijakan yang demikian, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya yang terpadu dan menyeluruh dalam bidang hukum pidana dalam upaya mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pencegahan kejahatan, dan salah satu

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit. hal. 31.

jalan yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaharui substansi hukum (hukum pidana materil) dalam rang mengefektifkan penegakan hukum.

Dalam rangka memperbaharui hukum pidana materil, Marc Ancel menyatakan bahwa "modern criminal science" terdiri dari tiga komponen "Criminologi", "Criminal Law" dan "Penal Policy". Selanjtnya dikatakan bahwa "Penal Policy" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>12</sup> Dengan demikian masalah pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari masalah perumusan delik dalam undang-undang (menyangkut kebijakan legislatif), penerapan dari undang-undang tersebut (kebijakan aplikatif) dan pelaksanaan dari keputusan pengadilan (kebijakan administrasi/ eksekusi).

Di samping itu dari isi/norma yang akan diatur, perlu dikembangkan kajian terhadap nilai-nilai moralitas umum yang melandasi hukum pidana (seperti nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan kasih sayang antar sesama manusia), dan yang lebih penting lagi adalah dikembangkannya nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) atau nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh masyarakat/bangsa Indonesia. Dalam hal demikian, jika yang dikehendaki itu adalah sistem hukum Pancasila, "maka

---

<sup>12</sup> Marc Ancel, dalam Barda Nawawi Arief, *ibid.* hal. 23.

sepatutnyalah dikajidan dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-nilai) Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hukum pidana yang ber”kemanusiaan yang adil dan beradab”, hukum pidana yang mengandung nilai-nilai “persatuan”, hukum pidana yang dijiwai “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan”, dan hukum pidana yang ber-“keadilan sosial”.<sup>13</sup>

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan hukum pidana dapat diwujudkan, karena di dalamnya tercakup segala aspek politik hukum, politik kriminal, dan politik sosial.

Sementara itu Sudarto melihat politik kriminal bukan saja masalah penanggulangan kejahatan yang hanya berfokus pada pembentukan peraturan perundang-undangan saja melainkan juga menyangkut aktifitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Sudarto mengatakan<sup>14</sup> Politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Ini mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi, di samping usaha-usaha yang tidak menggunakan (hukum) pidana.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994, hal.30.

<sup>14</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*; Alumni, Bandung, 1986, hal.73.

Dengan melihat pemikiran-pemikiran yang berkembang di atas, maka pembaharuan hukum pidana diarahkan untuk menunjang tujuan nasional dengan menggunakan kebijakan sosial, menunjang upaya perlindungan masyarakat dengan penanggulangan kejahatan dan dengan upaya memperbaharui substansi hukum guna mengefektifkan penegakan hukum.

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka masalah pembentukan hukum pidana tidak cukup hanya memperhatikan perlindungan masyarakat dalam pengertian umum di satu sisi dan disisi lain pada saat penerapan pidana hanya memperhatikan kepentingan dan pembinaan terhadap pelaku (*offenders*) melainkan juga harus memperhatikan kepentingan korban kejahatan (*victims*). Dalam kaitannya dengan ini Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa setiap kali terjadi pelanggaran hukum, maka ada pihak-pihak yang dilanggar haknya dan pula pihak-pihak melanggar kewajibannya. Apabila proses peradilan pidana dimaksudkan untuk benar-benar menaggulangi masalah kejahatan sebagai masalah sosial, maka kedua pihak, yaitu pelaku dan korban mau tidak mau haruslah sama-sama diperhatikan sesuai dengan peranan mereka masing-masing dalam proses peradilan pidana.<sup>15</sup>

Sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang memfokuskan diri pada pelaku (menyidik, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan

---

<sup>15</sup> Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkas, Cet. I (Edisi I), Bandung 1995, hal. 183.

kurang sekali memperhatikan korban. Yang acap kali terjadi, adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah “trauma”nya dan meningkatkan rasa ketidakberdayaan serta frustasinya karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup.<sup>16</sup>

Selanjutnya dikatakan oleh Boy Mardjono Reksodiputro, kesadaran kita bahwa sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu offender-centered, mengharuskan kita untuk memperbaiki “posisi korban” dalam sistem ini, agar apa yang diperolehnya dari proses peradilan pidana itu tidaklah hanya “kepuasan simbolis”. Di samping itu lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana, ditambah lagi dengan lemahnya perhatian aparat penegak hukum juga menyebabkan korban akan lebih dirugikan lagi dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa; Undang-undang di samping merupakan sarana untuk mengatur masyarakat, iapun bermaksud mengatur dan membatasi kewenangan pejabat penegak hukum. Oleh karena itu, apabila pengalokasian wewenang atau kekuasaan oleh undang-undang itu disalahgunakan atau diterapkan tidak pada tempatnya, maka wajar dapat menjadi faktor kriminogen dan sekaligus viktimogen.<sup>17</sup>

Proses peradilan pidana yang terlalu besar memperhatikan kepentingan dan keadilan untuk pelaku tindak pidana akan membawa kekecewaan pada masyarakat khususnya kekecewaan dari pihak korban yang

<sup>16</sup> Boy Mardjono Reksodiputro, dalam Sahetapy; *Victimologi Sebuah Bunga Rāmpai*, Op. Cit. Hal. 103

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief; *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumnii Bandung, 1998, hal. 204.

pada akhirnya baik masyarakat maupun korban akan enggan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain aparat penegak hukum membutuhkan kerjasama masyarakat atau korban baik dalam rangka mengungkap kejahatan yang telah terjadi maupun dalam rangka penyelesaian suatu perkara. Selama ini sebagian besar kejahatan dapat terungkap karena adanya laporan baik dari masyarakat maupun dari korban kejahatan. Oleh karena itu hak-hak dan kepentingan korban harus juga dijamin dalam proses penegakan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pertama dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum **untuk tidak menjadi korban tindak pidana**” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Kedua dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitan/kerugian orang yang **telah menjadi korban tindak pidana**” (jadi identik dengan “**penyantunan korban**”). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (a.l. dengan pema’afan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

Perlindungan untuk tidak menjadi korban kejahatan merupakan perlindungan umum kepada seluruh masyarakat yang dilakukan dengan

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Op. Cit. Hal. 60.

menjaga ketertiban umum serta mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan korban.

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban sebagaimana disebutkan di atas memang harus dipandang sebagai kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan dalam rangka penanggulangan kejahatan dan dalam rangka penegakan hukum karena akan membawa kesejahteraan masyarakat. Tetapi karena perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak menjadi korban masih bersifat abstrak dalam pengertian belum ada orang yang menjadi korban kejahatan sedangkan perlindungan korban setelah terjadinya kejahatan telah menimbulkan kerugian dan penderitaan, maka dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh pada korban yang setelah terjadinya kejahatan (korban konkrit) karena korban kejahatan inilah yang sungguh-sungguh menderita akibat dari suatu kejahatan.

Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan tidak saja berupa kerugian fisik/material seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinannya hilangnya pendapatan atau keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat

nonfisik yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.<sup>19</sup>

Menurut Arif Gosita tidak dipenuhinya kepentingan korban dalam tindak pidana yang dapat dilihat pada putusan pengadilan pidana yang tidak memuat keputusan mengenai ganti rugi pada pihak korban tindak pidana, merupakan suatu indikasi adanya kesadaran hukum palsu/semu karena tidak adanya rasa tanggung jawab moral dari mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana.<sup>20</sup>

Dalam suatu bangsa yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi (sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab), perlindungan korban seharusnya mendapat perhatian yang besar oleh karena disadari bahwa jangan sampai seorang menjadi menderita karena terjadinya suatu tindak pidana, tanpa mendapat perhatian dan perlindungan dalam proses peradilan pidana, bahkan seharusnya korban mendapat perhatian dari masyarakat dan negara. Pendekatan kemanusiaan harus dikedepankan bagi pelaku tindak pidana (*offenders*) maupun terhadap korban (*victims*). Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrech*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas; yaitu

---

<sup>19</sup> Andi Mattalatta, Op.Cit. hal. 36.

<sup>20</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 126.



kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana.<sup>21</sup> Sementara itu dalam Resolusi PBB No. 40/34 tanggal 15 Desember 1985, tentang *Declaration of Basic Principles of Justice, for Victims of Crime and Abuse of Power*, khususnya yang menyangkut korban kejahatan, PBB menganjurkan sedikitnya memperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*Access to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana pada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban; ganti kerugian ini sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarga atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban baik melalui negara, sukarelawan maupun masyarakat<sup>22</sup>

Perhatian terhadap korban kejahatan tersebut sangat penting, mengingat sampai saat ini korban kejahatan hanya berkedudukan sebagai saksi korban dan kurang mendapatkan perlakuan yang memadai dalam sistem peradilan pidana. Perlakuan yang adil terhadap korban sesuai dengan *konsep solidaritas dan kesetjakawanan sosial* di kalangan bangsa kita<sup>23</sup>. Sementara

<sup>21</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang)*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1990. Hal. 8.

<sup>22</sup> Dikutip dalam Muladi, *Ibid*, hal. 164.

<sup>23</sup> Muladi, *Loc.Cit.*

itu Sudarto sangat setuju dengan adanya perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia, dengan mengatakan: Mengenai penetapan ganti rugi yang harus dibayar oleh terdakwa kepada korban atau ahli warisnya adalah baik. Dengan ketentuan ini maka secara diam-diam sifat hukum pidana agak bergeser ke sifat keperdataan. Saya tidak mempunyai keberatan sama sekali terhadap ketentuan itu<sup>24</sup>.

Pemberian ganti rugi sebagai wujud dari perlindungan kepada korban dapat menjadi pidana alternatif untuk mengganti pidana penjara pendek, sebab pidana perampasan kemerdekaan itu sendiri sedapat mungkin harus digunakan secara hati-hati. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Nigel Walker mengingatkan beberapa prinsip pembatas antara lain sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. jangan hukum pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. jangan menggunakan HP untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. jangan menggunakan HP apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;

<sup>24</sup> Sudarto; *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 24 Desember 1974, hal 23.

<sup>25</sup> Nigel Walker dalam Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal.141.

- e. larangan-larangan HP jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang dicegah;
- f. HP jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik;
- g. HP jangan memuat larangan/ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan/dipaksakan (*'Unenforceable'*).

Masalah perlindungan korban dalam proses peradilan pidana sudah menjadi tuntutan masyarakat sekarang ini baik di tingkat nasional maupun di tingkat global dan oleh karena itu masalah perlindungan korban harus mendapat perhatian yang lebih besar dalam hukum pidana yang baru nanti. Perlindungan korban Dalam KHUP yang berlaku sekarang ini masih bersifat tidak langsung dalam pengertian bahwa KUHP berusaha mencegah terjadinya tindak pidana kepada masyarakat umum, dalam hal ini dikatakan oleh Barda Nawawi Arief<sup>26</sup> Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung” artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 55.

Mengingat masalah perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan masalah yang telah mendapat perhatian global, jadi bukan saja masalah yang menjadi perhatian nasional, 'maka sudah sewajarnya apabila masalah pengaturan perlindungan korban di negara-negara lain diambil sebagai bahan perbandingan guna merumuskan kebijakan legislatif dimasa yang akan datang, terutama dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik dalam memecahkan problema sosial seperti kebutuhan pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian tentang kebijakan perlindungan korban dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan penelitian yang berorientasi pada kebijakan, oleh karena itu pendekatan permasalahannya tidak bisa dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.<sup>27</sup> Dengan pendekatan kebijakan ini, diharapkan akan dapat diperoleh gambaran pengaturan perlindungan korban dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Metode pendekatan kebijakan hukum ini, dilakukan terutama dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini hanya digunakan pendekatan rasional, pendekatan tujuan dan pendekatan nilai.

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara*, Badan penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal.86.

Pendekatan yuridis normatif sebagaimana disebutkan di atas merupakan pendekatan utama, yaitu dengan mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan perlindungan korban dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam perundang-undangan hukum pidana dan aplikasinya di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data: Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber pada studi dokumen dan bahan-bahan pustaka sedangkan data primer digunakan untuk mendukung data sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini yang utama adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena itu dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>28</sup> Data sekunder ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*);
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu;
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro; *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11.

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji; *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 24.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep (rancangan) undang-undang, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat ahli dan ensiklopedi.<sup>30</sup>

Di samping data sekunder, dalam penelitian ini diperlukan juga data primer berupa pendapat para hakim mengenai putusan-putusan pengadilan yang menyangkut perlindungan korban khususnya yang menyangkut pemberian ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya. Data ini diperlukan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan aplikasi perlindungan korban dalam penegakan hukum pidana.

### 3. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer kemudian disaring dan diproses untuk dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penentuan metode analisis kualitatif dilandasi suatu pemikiran bahwa penelitian ini tidak saja bermaksud menggambarkan data yang telah diperoleh melainkan juga akan diberikan penjelasan uraian terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang bagaimana perlindungan korban diperhatikan dalam proses penegakan hukum pidana. Selanjutnya dengan hasil penelitian ini akan diperoleh pemikiran yang konstruktif dalam upaya memformulasikan perlindungan korban dalam hukum pidana nasional

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro; *Op.Cit. hal. 11-12.*

dimasa yang akan datang. Di samping itu digunakan juga metode analisis kuantitatif dalam menganalisa data-data statistik.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan penelitian ini dilakukan dengan rangkaian tulisan yang disusun sebagai berikut:

1. Bab I yang merupakan bab pendahuluan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang pengertian korban dan perlindungan korban, pentingnya perlindungan korban dalam penegakan hukum pidana dan perkembangan perlindungan korban di beberapa negara asing.
3. Bab III yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari : Formulasi perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia, pelaksanaan perlindungan korban dalam penerapan hukum pidana serta prospek pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana Indonesia.
4. Bab IV yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Korban Dan Perlindungan Korban

##### 1. Pengertian Korban

Berbicara masalah kejahatan dan para pelaku kejahatan berarti berbicara masalah manusia dan kemanusiaan artinya bahwa dalam kejahatan itu melibatkan/berhubungan dengan manusia yaitu manusia yang melakukan kejahatan dan manusia yang menjadi korban dari kejahatan itu. Hanya saja yang menjadi sorotan utama selama ini adalah yang menyangkut kepentingan orang yang melakukan kejahatan (*offenders*). Perhatian terhadap masalah mengapa sampai orang melakukan kejahatan dan bagaimana menangani orang-orang yang telah melakukan kejahatan, menjadi pokok kajian dari para ahli kriminal (kriminolog) dan banyak dibahas oleh para ahli ilmu hukum pidana. Demikian juga halnya peraturan-peraturan hukum pidana dan dalam proses peradilan pidana semuanya berorientasi pada pelaku kejahatan (*offenders oriented*).

Adanya perhatian yang besar terhadap pelaku kejahatan seperti yang dikemukakan di atas terlihat dengan jelas dalam ketentuan-ketentuan dalam aturan pidana dalam KUHP serta dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana (KUHP) orientasinya adalah agar para pelaku kejahatan dapat diadili dan dalam proses peradilan itu hak-hak dari



tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar oleh aparat yang terlibat dalam proses peradilan pidana tersebut.

Kenyataan bahwa hukum pidana dan proses peradilan pidana serta kajian terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan berorientasi pada pelaku kejahatan tidaklah terlalu keliru dan sangat berguna dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hanya saja perlu disadari bahwa setiap terjadi suatu kejahatan sudah barang tentu melibatkan dua pihak yaitu orang yang melakukan kejahatan disatu pihak dan orang yang menjadi sasaran atau korban dari kejahatan itu. Orang yang melakukan kejahatan dalam hal ini berusaha memperoleh keuntungan dari pihak lain dengan cara memaksakan kehendaknya atau dengan cara melanggar hukum. Sementara orang yang menjadi sasaran kejahatan (korban) menderita kerugian moril maupun materil sebagai akibat dari kejahatan.

Memberikan pengertian dari istilah korban kejahatan tidaklah sesederhana seperti yang disebutkan diatas yaitu sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena seperti yang disebutkan di atas bahwa korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan semakin bervariasi. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan kejahatan bahkan pembahasannya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial,

ekonomi bahkan sampai pada masalah hak-hak asasi manusia (HAM) seperti yang dikemukakan oleh Boy Mardjono Reksodiputro.<sup>29</sup> Dalam pemikiran semacam ini maka pengertian korban pun diperluas. Tidak saja korban dari kejahatan konvensional (misalnya: pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan pencurian) tetapi juga mencakup korban dari kejahatan-kejahatan nonkonvensional seperti: terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasidan kejahatan melalui komputer. Dan kini pembicaraan mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak itu pula ruang lingkup studi tentang korban ini menjangkau penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak, dan sebagainya. Dan biasanya disejajarkan pula di sini adalah penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*), seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

---

<sup>29</sup> Boy Mardjono Reksodipoetro, dalam Sahetapi Et, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal : 96.

Sementara itu Arif Gosita memberi pengertian korban adalah<sup>30</sup> mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Namun demikian ada yang melihat pengertian korban dari sudut pandang yang sempit yaitu yang hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu *sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.* ( A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime)<sup>31</sup>.

Dalam Konverensi PBB tentang “ *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*” dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “korban” ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pengertian korban ini termasuk juga orang-orang yang menjadi

<sup>30</sup> Arif Gosita; Loc. Cit. Hal. 41.

<sup>31</sup> Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal. 78.

korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara Internasional<sup>32</sup>.

Dalam pengertian korban yang dirumuskan dalam resolusi PBB seperti disebutkan di atas ternyata bahwa seseorang atau sekelompok orang sudah dapat dinyatakan sebagai korban meskipun pelaku kejahatan telah atau belum diketahui, ditangkap, ditahan, dituntut atau dipidana serta tanpa memandang adanya hubungan keluarga dengan korban.

Menyangkut hubungan keluarga antara pelaku kejahatan dengan orang yang menjadi korban kejahatan perlu diperhatikan untuk menghindari jangan sampai terjadi karena adanya hubungan keluarga antara pelaku kejahatan dengan korban menyebabkan korban yang masuk dalam kategori mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku kejahatan menjadi terabaikan. Jika hal ini terjadi, maka orang yang menjadi korban kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga akan menderita terus menerus tanpa mendapat perhatian dan perlindungan. Oleh karena itu seiring dengan munculnya perhatian pada adanya kejahatan dalam rumah tangga, (misalnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau kekerasan orang tua terhadap anak), maka

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op. Cit. Hal. 54.

korban dari kejahatan dalam rumah tangga seyogyanya harus mendapat perhatian dan perlindungan seperti korban kejahatan lainnya.

Hal lain yang menarik untuk diperhatikan dan dikaji dari pengertian korban yang dirumuskan dalam resolusi PBB No. 40/34 adalah adanya keinginan untuk memperluas pengertian korban yang tidak saja terbatas pada korban perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain melainkan juga meliputi keluarga dari korban serta atau orang-orang lain yang menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian akibat tindakan atau usahanya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Memberikan perhatian dan perlindungan bahkan jika perlu dengan memberikan penghargaan terhadap orang yang menderita akibat mencegah timbulnya kejahatan/korban, tidak saja akan meringankan beban penderitaan/kerugian yang dirasakan oleh orang tersebut tetapi akan berpengaruh juga terhadap upaya mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mencegah timbulnya kejahatan atau timbulnya korban dalam masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan (termasuk mencegah timbulnya korban) sangat diperlukan karena sampai saat ini negara Indonesia masih mengalami kemampuan yang terbatas dalam menyediakan aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari adanya kejahatan disisi lain wilayah dan warga yang harus dilindungi sangat luas.

Dari pengertian-pengertian korban seperti yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa pengertian korban meliputi semua orang yang menderita akibat perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain. Tetapi dalam tulisan ini pengertian korban terbatas pada masalah korban sebagai akibat dari tindak pidana, termasuk di dalamnya korban pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM), jika pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) itu diproses melalui pengadilan HAM serta korban dari tindakan penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan hukum dari aparat pemerintah khususnya dalam proses penegakan hukum pidana.

Dalam pengertian korban disini meliputi orang perorangan ataupun sekelompok orang, yang dilakukan/ditimbulkan oleh orang-perorangan atau sekelompok orang, yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa maupun yang dilakukan oleh aparat pemerintah/aparat penegak hukum.

Penderitaan/kerugian yang dialami korban itu dapat berupa penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka.

Meskipun penderitaan yang dialami oleh korban meliputi banyak aspek, namun demikian tidak semua aspek penderitaan korban itu dapat dilindungi atau dapat diperhatikan dalam proses pengadilan pidana dan oleh karena itu tidak dapat diharapkan semua aspek itu tercakup dalam kebijakan

hukum pidana baik dalam kebijakan legislatif, kebijakan aplikatif maupun dalam kebijakan eksekusi.

Terkait dengan penderitaan yang dialami oleh korban serta perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum (pidana), sampai saat sekarang belum ada hukum positif yang mengatur secara rinci hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban selain penggantian kerugian dan rehabilitasi. Oleh karena itu Arif Gosita menyarankan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban korban.<sup>33</sup>

Bagaimanapun pentingnya masalah perlindungan korban dituangkan dalam kebijakan hukum pidana, tetapi harus diingat juga bahwa hukum pidana itu mempunyai keterbatasan dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang menyangkut perlindungan korban dari suatu tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,<sup>34</sup> Penegakan hukum bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Penegakan hukum (positif) merupakan upaya terakhir, apabila usaha-usaha non hukum tidak berhasil menegakan keadilan. Dalam penegakan hukum, pidana harus merupakan upaya terakhir untuk menegakan keadilan. Oleh karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum.

---

<sup>33</sup> Arif Gosita, Op.Cit. hal. 52.

<sup>34</sup> Panda Nababan Ed., "Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak hukum," *Acuan Untuk Penegak Hukum Menuju Keadilan*, Cet. I, Yayasan Keadilan, Jakarta, 1983, hal 31-32..

Perlindungan korban dengan menggunakan sarana penal saja tidak akan mampu meringankan beban penderitaan korban oleh karena itu perhatian pada korban harus juga dipadukan dengan upaya nonpenal berupa kebijakan sosial oleh pemerintah maupun oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM).

## 2. Perlindungan Korban

Membicarakan masalah perlindungan, paling tidak akan terkait dua pihak, yaitu pihak yang melindungi dan pihak yang dilindungi. Demikian juga halnya masalah perlindungan hukum bagi korban yang terkait adalah korban yang harus dilindungi dan pemerintah/negara yang memberi perlindungan, dan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan maka yang paling berperan adalah pemerintah karena menurut Philipus M Hadjon,<sup>35</sup> perlindungan hukum itu selalu terkait dengan kekuasaan. Dalam kaitannya dengan tulisan ini adalah kekuasaan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dari suatu tindak pidana.

Adanya korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari adanya kejahatan itu sendiri, tetapi pengkajin terhadap aspek korban ini sendiri telah terjadi penelantaran dibandingkan dengan pengkajian terhadap konstruksi kejahatan

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, *Dinamika Hukum*, Majalah Hukum Universitas Jenderal Soedirman No. 2 tahun I, Edisi Oktober 1996, hal. 5.



dan pelakunya<sup>36</sup>. Tetapi sejak kajian ilmiah tentang korban melalui Viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek<sup>37</sup>, maka perhatian terhadap korban semakin berkembang dan mendapat perhatian dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban. Hanya saja pengertian perlindungan korban dalam kajian viktimologi mencakup pengertian yang sangat luas karena dikaitkan dengan semua korban dari tindakan-tindakan viktimisasi yang dapat diartikan sebagai penderitaan, baik fisik ataupun secara psikis atau mental bertalian dengan berbagai perbuatan. Perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perbuatan perorangan atau perbuatan sekelompok orang, atau dari suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari pihak penguasa, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan dapat juga sekelompok orang atau komunitas tertentu atau (sebagian rakyat yang menderita, bukan saja fisik, melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomis, sosial, agama dan dalam arti psikis secara luas<sup>38</sup>.

Luasnya cakupan korban yang hendak dilindungi menurut kajian viktimologi di atas terkait dengan pengkajian kejahatan dalam pengertian kriminologi yang memandang kejahatan tidak saja dari sudut pandang hukum pidana tetapi juga meliputi semua perbuatan yang menyimpang atau perbuatan anti sosial yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

<sup>36</sup> Sudarto ; *Hukum dan Hukum Pidana*, cet. II Alumni, Bandung 1986, hal 183.

<sup>37</sup> I.S. Susanto; *Kriminologi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 89.

<sup>38</sup> J.E. Sahetapy. Ed.; *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*; PT. Eresco, Bandung, cet. I, 1995, hal. Vi.

Dengan melihat penderitaan korban, perlindungan korban dapat diusahakan dengan berbagai cara yang menurut Reiff<sup>39</sup> sebenarnya merupakan perpaduan dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha dibidang kesejahteraan sosial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana. Dengan ketiga jalur pelayanan ini, maka program-program pemberian bantuan kepada korban kejahatan, khususnya di berbagai negara, bukan saja menjadi kewajiban pelaku dari kejahatan itu, tetapi juga masyarakat umum dan negara karena kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu memberikan perlindungan kepada individu korban kejahatan berarti memberikan perlindungan masyarakat yang menjadi tujuan dari penjatuhan pidana.

Perlindungan korban dalam tulisan ini hanya akan membicarakan masalah perlindungan terhadap korban kejahatan dalam pengertian hukum pidana yaitu perlindungan korban dalam kebijakan pidana baik kebijakan legislatif, kebijakan aplikasi maupun dalam kebijakan eksekusi. Dengan kata lain yang ingin dilihat adalah perlindungan korban yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di luar KUHP serta bagaimana pengaturan perlindungan korban dalam konsep

---

<sup>39</sup> Reiff dalam Andi Mattalatta; Op.Cit. hal 37.

Rancangan KUHP nasional dan bagaimana perlindungan korban dalam penjatuhan pidana oleh hakim maupun dalam pelaksanaan putusan hakim.

### 3. Pentingnya Perlindungan Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa selama ini perhatian yang sangat besar dalam hukum pidana tertuju pada pelaku tindak pidana sedangkan korban dari tindak pidana cenderung diabaikan. Tetapi perkembangan ilmu hukum pidana modern sudah mulai memberikan perhatian pada korban kejahatan.

Pentingnya memberikan perhatian pada perlindungan korban didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada *patokan yang pasti dalam bertingkah laku*.<sup>40</sup>

Selanjutnya dikatakan, bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

---

<sup>40</sup> Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief; Op.Cit. hal. 77

Alasan lain pentingnya perlindungan korban kejahatan dalam pengaturan hukum pidana adalah berdasarkan alasan kontrak sosial (*social contract argumen*) dalam hal ini negara mengambil alih semua rekasi sosial terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang adanya tindakan-tindakan yang bersifat pribadi dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*), dalam hal ini negara mengambil tanggung jawab terhadap keamanan warga negaranya baik mengenai keamanannya maupun mengenai ketertiban dalam hidup bermasyarakat karena negara mempunyai fasilitas untuk itu. Oleh karena itu jika terjadi suatu kejahatan yang membawa akibat penderitaan bagi korban, maka negara juga harus memperhatikan penderitaan dari korban tersebut baik dengan memberikan pelayanan atau melalui pengaturan hak-hak korban.

Pengaturan perlindungan terhadap korban juga dapat membawa keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku kejahatan serta dapat mewujudkan tercapainya tujuan pemidanaan. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya pengaturan perlindungan korban adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan Bagi Korban; Seperti yang telah diketahuibahwa korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita kerugian mental/fisik, materil maupun spiritual sebagai akibat dari suatu tindak pidana, dan selama ini korban dari tindak pidana tersebut dalam proses

peradilan pidana hanya dijadikan sebagai saksi saja. Kehadiran korban sebagai saksi hanya menambah penderitaan bagi korban karena harus menghadap pada penyidik untuk memberikan keterangan serta harus menghadiri sidang pengadilan untuk memberikan kesaksian. Keadaan seperti ini disamping melelahkan juga memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Selain dari itu korban kejahatan ini harus meninggalkan pekerjaannya disisi lain korban dapat mendapat ancaman dari pelaku kejahatan yang menyebabkan korban merasa tidak aman atau keselamatan diri dan keluarganya terancam. Penderitaan korban seperti yang dikemukakan diatas akan dapat dihilangkan atau paling tidak dapat dikurangi manakala dalam perundang-undangan pidana maupun dalam proses peradilan pidana, korban tidak saja dijadikan objek pemeriksaan untuk membuktikan adanya tindak pidana serta untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi korban dijadikan subjek yang perlu mendapatkan hak-haknya sebagai orang yang dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dengan demikian perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan dalam hukum pidana dan dalam proses peradilan pidana akan dapat mengurangi penderitaan yang dialami serta memberikan keadilan pada diri korban.

## 2. Keuntungan Bagi Pelaku Tindak Pidana

Adanya perhatian dan perlindungan pada korban akan membawa konsekwensi adanya perubahan atau penambahan jenis-jenis pidana yang dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada hakim dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Perkembangan hukum pidana modern yang mulai memberikan perhatian pada hak-hak korban menunjukkan adanya keinginan untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban kejahatan dengan tetap memberikan perhatian pada kepentingan pelaku kejahatan (*offenders*) serta kepentingan masyarakat banyak. Hal ini terlihat misalnya dengan dimasukkannya pidana ganti rugi dalam berbagai peraturan perundangan serta adanya keinginan untuk memasukkan pidana ganti dalam konsep rancangan KUHP nasional. Dalam pasal 62 ayat konsep rancangan KUHP nasional menyebutkan pidana tambahan terdiri dari:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat.

Meskipun pembayaran ganti kerugian hanya sebagian dari bentuk pemenuhan hak-hak korban, tetapi hal itu telah menunjukkan adanya perhatian dalam memberikan perlindungan pada orang-orang yang menjadi korban kejahatan. Hanya saja dalam konsep rancangan KUHP nasional ditentukan bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika telah ditentukan dalam pasal-pasal yang didakwakan/yang dilanggar akan membatasi hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan (ganti kerugian). Tetapi hal ini sedikit dapat dikesampingkan dengan adanya pasal 55 (1) yang menentukan ; jika pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.

Dengan adanya ketentuan pasal 55 (1) konsep Rancangan KUHP nasional tahun 2000, maka untuk semua tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pula pidana tambahan termasuk dalam hal ini pidana tambahan ganti kerugian meskipun dalam pasal-pasal yang dilanggar tidak ditentukan demikian.

Kembali pada masalah keuntungan bagi pelaku tindak pidana jika hak-hak korban diatur dalam hukum pidana, maka dengan adanya pidana ganti kerugian yang dijatuhkan oleh hakim dan pelaku kejahatan dengan kerelaan pelaku untuk memberikan hak-hak korban berupa ganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, maka hal ini akan menghilangkan rasa sakit hati dan rasa dendam dari

korban atau keluarganya dan atau akan menjadi salah satu alasan yang dapat meringankan hukuman (pidana) bagi pelaku tindak pidana.. Disamping itu kesediaan pelaku tindak pidana untuk dalam meringankan beban penderitaan yang dialami oleh korban akan menyebabkan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran pelaku tindak pidana dalam masyarakat akan lebih mudah yang pada akhirnya akan memudahkan pelaku tersebut dalam menempuh jalan hidupnya sekaligus melahirkan kepercayaan diri pada si pelaku tindak pidana kahadirannya diterima dengan baik lagi oleh masyarakatnya.

Selain dari pada itu, di dalam Konsep rancangan KUHP tahun 2000 ditentukan pula bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim wajib mempertimbangkan antara lain; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana (pasal 51 ayat (1) Konsep). Ketentuan seperti ini tidak saja tertuju pada sikap menyesal dari pelaku tindak pidana terhadap apa yang telah dilakukannya tetapi juga termasuk sikap baik pelaku terhadap korban yang diwujudkan dengan jalan memberikan ganti rugi, memperbaiki kerusakan akibat dari tindak pidana atau berupa permohonan maaf dari pelaku kepada korban. Jika pelaku tindak pidana berbuat seperti itu maka sudah barang tentu akan dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.



### 3. Keuntungan Dalam Proses Peradilan pidana

Proses peradilan pidana mulai berjalan sejak diketahui telah terjadinya suatu tindak pidana. Terjadinya suatu tindak pidana dapat diketahui melalui :

- a. adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atau korban kejahatan
- b. pemberitaan pers/media massa
- c. tertangkap tangan<sup>41</sup>

Apa yang dimaksud dengan laporan menurut Pasal 1 butir 29 UU No. 8 tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana.

Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan dirinya (Pasal 1 butir 25 UU No. 8 Tahun 1981).

Pemberitaan melalui media massa baik elektronik maupun media cetak seringkali memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang adanya dugaan terjadinya suatu perbuatan pidana sehingga aparat penegak

---

<sup>41</sup> Nawawi; *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta, 1983, hal. 8

hukum langsung mengambil langkah-langkah/tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum mengetahui terjadinya suatu tindak pidana karena terjadinya keadaan tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 butir 19 UU No. 8 Tahun 1981). Laporan atau pengaduan dari korban kejahatan banyak menentukan berjalannya proses peradilan pidana. Si korban tidak hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delikueni dan deviasi<sup>42</sup>.

Hal ini ternyata juga dari banyaknya kasus pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum karena adanya laporan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua kejahatan yang terjadi telah atau akan dilaporkan oleh mereka yang menjadi korban kejahatan. Banyak faktor yang menyebabkan

---

<sup>42</sup> Arif Gosita; Op.Cit. hal. 40.

mereka yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan tentang telah terjadinya suatu kejahatan pada dirinya. Salah satu faktor yang menyebabkan korban tidak melaporkan terjadinya kejahatan pada dirinya adalah tidak adanya atau kurangnya jaminan atau perlindungan terhadap korban kejahatan baik jaminan berupa materiil maupun jaminan keamanan terhadap diri dan keluarganya.

Berkaitan dengan adanya korban yang tidak memberikan laporan kepada aparat penegak hukum, Steven Box<sup>43</sup> berpendapat, ada berbagai alasan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor, karena:
  - a. menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya;
  - b. menganggap bahwa peristiwa itu merupakan urusan pribadi, karena;
    1. akan menyelesaikannya langsung di luar jalur pengadilan dengan si pelaku;
    2. merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kantor polisi (tahap penyidikan) maupun pada saat dilangsungkannya pemeriksaan kasus tersebut di sidang pengadilan ( misalnya, dalam

---

<sup>43</sup> Mardjono Reksodiputro, Op.Cit. Hal 37-38.

- kejahatan kesusilaan atau mengalami penipuan karena kebodohnya sendiri);
2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya sesungguhnya telah menjadi korban suatu peristiwa kejahatan;
  3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*) dan karena itu sukar ditentukan secara khusus dan jelas (misalnya masyarakat konsumen);
  4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena diri sendiri terlibat dalam kejahatan (*victims of their own criminal activity*);
  5. Secara resmi tidak terjadi korban, karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan.

Apa yang dikemukakan oleh Steven Box tersebut di atas memang terjadi dalam masyarakat. Salah satu contoh kasus dimana korban tidak melapor kepada aparat penegak hukum karena tidak adanya jaminan keselamatan baik keselamatan harta benda maupun keselamatan diri dan keluarganya adalah yang terjadi di Mataram NTB tanggal 12 Nopember 2001. Seorang yang kehilangan sepeda motor terpaksa menebus sepeda motornya dari pencurinya karena diancam oleh pelakunya jika melaporkan kejadiannya kepada aparat kepolisian.

Berkaitan dengan tidak melaporkannya korban kepada aparat penegak hukum tentang terjadinya suatu kejahatan, Ruslan Saleh menyatakan; banyak terjadi di negara-negara yang telah maju sekalipun, yaitu banyak orang

kecurian, datang ke kantor polisi, sampai di sana diberikan kepadanya formulir-formulir untuk diisi, dan hanya itulah. Setelah itu tidak ada tindakan lain. Polisi tidak bergairah untuk menyelidiki sekitar pencurian yang telah terjadi itu. Sebaliknya bagi warga negara bersangkutan tidak terbuka jalan lain untuk merubah cara bekerjanya polisi seperti yang telah mereka pilih sendiri itu.<sup>44</sup>

Dengan kenyataan seperti yang dikemukakan di atas, maka korban kejahatan akan tetap dirugikan selama belum ada pengaturan tentang jaminan perlindungan terhadap mereka, dan itu akan membawa keburukan pada jalannya proses peradilan pidana. Oleh karena itu adanya jaminan pengaturan perlindungan korban akan menunjang jalannya proses penegakan hukum dan sekaligus memperlancar jalannya proses peradilan pidana.

Seorang korban yang diberi perlindungan dan jaminan keamanan serta keselamatan harta benda, diri dan keluarganya akan berusaha untuk mendukung proses peradilan pidana, karena melalui proses peradilan itu orang yang menjadi korban kejahatan akan memperoleh hak-haknya.

#### 4. Membantu Mewujudkan Tujuan Pidanaan

Adanya keseimbangan antara pengaturan kepentingan pelaku tindak pidana (*offender*) dengan pengaturan kepentingan korban (*victim*) dalam hukum pidana, tidak saja memberikan keuntungan korban untuk memperoleh

---

<sup>44</sup>Roeslan Saleh; *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Cet. I, 1988. Hal. 155.

hak dan perlindungan yang selama ini cenderung diabaikan, tetapi juga akan memberikan manfaat dalam mewujudkan tujuan pidana yang pada akhirnya akan membawa kebaikan/ manfaat pada pelaku.

Seorang pelaku yang dengan kesadaran sendiri memulihkan penderitaan korban/memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana akan melahirkan suatu hubungan yang lebih baik dengan korban atau keluarganya atau dengan masyarakat sekitarnya. Disamping itu kesadaran untuk membantu memulihkan kondisi korban akan meniadakan rasa bersalah pada diri pelaku tindak pidana. Meniadakan rasa bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan salah satu dari tujuan yang ingin dicapai dengan pidana disamping tujuan-tujuan lainnya. Dalam konsep rancangan KUHP nasional tahun 2000 disebutkan bahwa tujuan pidana itu meliputi :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Pasal 50 ayat (1) Konsep).

Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam Pasal 51 Konsep Rancangan KUHP Tahun 2000 disebutkan

(1): Dalam pidanaanan wajib dipertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Penjelasan Pasal 51 ayat menyebutkan antara lain bahwa: Ketentuan dalam ayat ini memuat pedoman pidanaanan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan butir-butir dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam pasal ini.

Dengan melihat tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, ternyata ada beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui pengaturan hak-hak korban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa; misalnya dengan memerintahkan terdakwa/pelaku tindak pidana untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana. Perintah semacam ini akan mewujudkan tujuan pemidanaan berupa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Memudahkan mamasyarakatkan terpidana serta meniadakan rasa bersalah pada diri terpidana.

Selain dari manfaat/keuntungan seperti yang telah dikemukakan di atas, pengaturan perlindungan korban dalam peraturan perundang-undangan pidana (KUHP) Indonesia juga penting untuk diwujudkan dalam rangka menyesuaikan Hukum pidana Indonesia dengan perkembangan hukum pidana secara global terutama yang dihasilkan dalam deklarasi-deklarasi PBB.

#### **4. Perkembangan Perhatian Terhadap Perlindungan Korban**

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa perhatian kriminologi dan ilmu hukum pidana lebih tertuju pada pelaku kejahatan (offender) dan cenderung melupakann orang-orang yang menjadi korban kejahatan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kepentingan korban telah diambil alih atau diwakili oleh negara. Dalam hal ini negara bertanggung-jawab atas



keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika terjadi suatu tindak pidana maka negara melalui aparat penegak hukumnya, yang akan menangani atau yang akan menyelesaikannya, sedangkan anggota masyarakat dilarang untuk bertindak sendiri dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Pada awalnya, masalah kejahatan adalah masalah antara pelaku dengan korbannya secara pribadi. Tetapi karena kejahatan itu dilihat tidak saja mengganggu hak-hak pribadi melainkan juga mengganggu kedamaian dalam masyarakat maka negara tidak memperbolehkan lagi masalah kejahatan itu diselesaikan secara pribadi antara pelaku dengan korbannya. J.E. Sahetapy mengatakan; Bilamana kita lihat pada sejarah perkembangan hukum (hukum pidana), maka pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran adalah sepenuhnya hak (dan kewajiban korban). Akibat dari dendam (darah) yang sering tidak berkeputusan, telah timbul keadaan bahwa lambat laun 'ganti rugi' oleh pelanggar dapat dibayar dengan harta'. Selanjutnya, dirasakan pula bahwa pelanggaran ini tidak hanya merupakan hubungan (urusan) pelaku dan korban. Pelaku pelanggaran dianggap juga mengganggu 'keseimbangan' ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam 'keseimbangan' antara pelaku dengan masyarakatnya. Rupanya, pada

akhirnya gangguan yang terakhir inilah yang lebih diperhatikan sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai satu-satunya yang berhak untuk menuntut 'ganti rugi' dari pelaku. Disinilah korban telah kehilangan haknya mendapat pula 'ganti rugi'<sup>45</sup>. Hal yang sama sebelumnya juga dikemukakan oleh Pompe<sup>46</sup> bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.

Karena menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, menyebabkan perhatian negara pada perlindungan korban secara individu menjadi terlupakan dan hal ini semakin lama dirasakan tidak adil karena negara juga mengambil tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban anggota masyarakatnya.

Perhatian pada korban kejahatan mulai dipikirkan sejak munculnya karya ilmiah dari Benjamin Mendelsohn pada tahun 1937 "*Bio-psycho-social Horizons: Victimology*".

<sup>45</sup> J.E. Sahetapy; Op. Cit. Hal. 113-114.

<sup>46</sup> Pompe dalam Bambang Poernomo; *Asas-Asas HUKUM PIDANA*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985, hal.37.

Kemudian pada tahun 1941 Hans von Hentig menulis karya ilmiah dengan judul "*The Criminal and His Victim*",.

Kemudian pada tahun 1947 Benjamin Mendelsohn dalam sebuah tulisannya memperkenalkan apa yang dinamakannya dengan "*the science of the victim*" yaitu "*victimology*".

Pada tahun 1973 diselenggarakan Simposium Internasional I tentang victimology yang dilaksanakan di Israel. Simposium Internasional ini menunjukkan adanya perhatian yang besar terhadap perkembangan ilmu yang baru tumbuh yaitu victimology yang sekali menyadarkan masyarakat ilmiah betapa pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada orang-orang yang menjadi korban kejahatan. Dengan meningkatnya perhatian pada masalah korban, membawa cakrawala baru pada para ahli hukum pidana, dimana pada awalnya para ahli hukum pidana mengarahkan perhatiannya pada masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan hanya berorientasi pada pelaku kejahatan dan hanya memberikan perlindungan yang bersifat abstrak pada masyarakat, perkembangan sekarang para ahli hukum pidana sudah mulai memberikan perhatian pada masalah yang berhubungan dengan korban kejahatan.

Dalam kongres PBB ke VII tahun 1985 yang bertemakan "*The Prevention of Crime and the treatment of Offenders*", telah membicarakan juga masalah yang berkaitan dengan korban kejahatan. Dalam kongres

tersebut dikemukakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana ("victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system")<sup>47</sup>.

Dari kongres PBB ke VII itu telah dikeluarkan suatu resolusi tentang *declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*. Dalam pasal 6.b deklarasi tersebut dinyatakan : *allowing the views and concerns of victim to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interest and consistent with the relevant national criminal justice system*.<sup>48</sup>

Dalam resolusi PBB No. 45 / 110 tanggal 14 Desember 1990 telah dikeluarkan **Un Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules)**, selanjutnya disingkat SMR.

Salah satu yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan SMR adalah tiap-tiap negara harus berusaha untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak individual si pelaku tindak pidana, hak-hak korban, dan kepentingan masyarakat berupa keamanan publik dan pencegahan kejahatan.

Selanjutnya dalam jaminan perlindungan hukum (*legal safeguards*) disebutkan pemilihan/seleksi tindakan *non-custodial* harus didasarkan pada penilaian kriteria yang ditetapkan mengenai :

<sup>47</sup> Dokumen kongres PBB ke VII, No.-Kode : A-CONF. 121/C.2/L.14, hal. 14.

<sup>48</sup> Ibid, No. 40/34.

- the nature and gravity of the offence ;
- the personality, background of the offender ;
- the purposes of sentencing ; and
- the rights of victims. (garis bawah dari penyusun)

Tindakan non-custodial pada tahap sebelum proses peradilan (*Pretrial Stage*) ditentukan dalam Rule 5 (Pre-trial disposition); Dalam hal sesuai dengan sistem hukum, polisi, jaksa, atau pejabat lain yang berhubungan dengan kasus kriminal harus diberi kekuasaan/kewenangan untuk membebaskan pelaku tindak pidana (*should be empowered to discharged the offender*) apabila mereka mempertimbangkan bahwa tidak perlu meneruskan perkara itu karena (berdasarkan alasan):

- the protection of society, crime prevention, atau
- the promotion of respect for the law and the rights of victims.

Selain apa yang telah dikemukakan di atas masih ada hal lain yang menyangkut kepentingan korban yang harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum yang bertugas pada tahap peradilan dan pemidanaan apabila hendak menjatuhkan/memutuskan memberikan tindakan non-custodial terhadap pelaku tindak pidana, terutama perintah untuk membayar ganti rugi (*restitution*) atau memberikan kompensasi kepada korban.

Semua yang dikemukakan diatas memperlihatkan adanya perhatian dari masyarakat internasional (PBB) terhadap kepentingan korban kejahatan.

Perkembangan yang demikian cepat dalam memperhatikan korban telah melahirkan perubahan dalam hukum pidana di sebagian negara di dunia.

Beberapa negara telah mengatur perlindungan korban dalam hukum pidananya meskipun perhatian pada kepentingan korban itu masih terbatas pada pemberian ganti baik oleh pelaku tindak pidana maupun pemberian ganti rugi oleh negara. Sebagai bahan perbandingan, dibawah ini akan dikemukakan beberapa negara yang telah mengatur pemberian ganti rugi kepada korban:

### **1. Portugal**

Pasal 59 Penal Code Portugal menyatakan: hakim hanya dapat menerapkan sanksi teguran apabila :

1. Terdakwa bersalah melakukan delik yang tidak diancam pidana lebih berat dari 3 (tiga) bulan penjara, denda sebesar 90 denda-harian, atau gabungan/kombinasi kedua pidana itu.
2. Terdakwa harus telah membayar kerugian yang ditimbulkan.

Disamping hal tersebut di atas, Dalam KUHP 1983 Portugal juga dimasukan ketentuan yang membolehkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap delik:

- a. yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara; dan
- b. yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian.

Syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana itu adalah:

- ada kesalahan minimal;
- kerugian telah dibayar; dan
- tidak ada faktor-faktor (untuk merehabilitasi atau pencegahan umum) yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini<sup>49</sup>.

Adanya ketentuan tersebut di atas sebenarnya untuk menghindari dijatuhkannya pidana pendek dan dengan demikian tetap berorientasi pada pelaku, tetapi sebagian dari syarat yang ditentukan untuk itu membawa pengaruh pada perbaikan nasib korban yaitu dengan ditentukannya ada ganti kerugian dan memperbaiki kerusakan akibat dari suatu kejahatan.

Beberapa hal yang menarik dari Penal Code Portugal dan yang agak berbeda dengan KUHP negara lain adalah :

- a. yang menyangkut syarat khusus yang dapat ditetapkan oleh hakim dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat/pidana tertunda (*suspended sentence*) adalah adanya kewajiban terpidana untuk melakukan perbaikan moral kepada korban. Disamping itu pelaku tindak pidana harus membayar kompensasi kepada korban atau memberi jaminan untuk itu serta membayar sejumlah uang kepada bendahara negara sebesar jumlah denda maksimum yang diancamkan dalam delik tersebut.

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*; Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNDIP, Semarang, 2001, hal.73.

b. Pasal 129 Penal code Portugal menentukan; hakim dapat menghadiahkan semua atau sebagian denda itu kepada pihak yang dirugikan (korban) apabila ia menderita kerugian finansial yang sangat serius dan terdakwa tidak dapat membayar kembali. Kemudian atas permintaan pihak yang dirugikan, barang-barang yang disita atau hasil kejahatan dan juga keuntungan yang berasal dari kejahatan dapat diberikan/dihadiahkan kepadanya.

Dengan adanya pengaturan yang demikian, dapat dikatakan bahwa Penal Code Portugal telah memberikan perhatian yang besar terhadap korban disamping memperhatikan kerugian materiil dan moril tetapi juga sekaligus telah membuka kesempatan yang lebih luas kepada korban untuk memperoleh perlindungan terutama penggantian kerugian dengan cara meminta kepada hakim untuk memutuskan sebagian atau seluruh uang denda dari pidana yang dijatuhkan diserahkan kepada korban serta meminta agar benda yang berkaitan dengan kejahatan serta keuntungannya yang telah disita dapat diberikan kepada korban.

Melihat ketentuan seperti yang dikemukakan di atas, sebenarnya Penal Code Portugal membebaskan penggantian kerugian dan perintah perbaikan moral kepada terdakwa/terpidana. Namun demikian dapat dikatakan bahwa negara juga ikut membayar ganti kerugian kepada korban. Dapat dikatakan demikian karena uang denda sebagai pidana seharusnya



masuk ke kas bendahara negara demikian juga dengan uang hasil lelang dari barang-barang sitaan seharusnya dimasukkan ke kas bendahara negara. Tetapi karena adanya ketentuan yang membolehkan hakim untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak yang dirugikan maka negara menjadi tidak dapat memperoleh uang denda dan uang hasil lelang barang sitaan.

## 2. Yugoslavia

Seperti di dalam KUHP Indonesia, dalam KUHP Yugoslavia tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perlindungan korban sebagai salah satu jenis pidana. Hanya saja dalam KUHP Yugoslavia terdapat satu jenis pidana yaitu **Teguran/Peringatan** (*Judcial Admonition*).

Dalam KUHP Yugoslavia terdapat pasal yang memberi kemungkinan pada hakim untuk dapat memberikan perlindungan pada korban khususnya yang memberi kemungkinan untuk memberikan ganti kerugian pada korban. Pasal yang dimaksud adalah Pasal yang mengatur tentang pidana bersyarat/pidana tertunda (*suspended sentence*) yang diatur dalam pasal 48 ayat (2) dan pasal 50 B yang mengatur tentang peringatan/teguran judicial (*judicial admonition*).

Pasal 48 ayat (1) KUHP Yugoslavia menentukan: Pelaksanaan pidana penjara atau denda dapat ditunda dalam waktu 1 s/d 5 tahun, apabila selama waktu itu terpidana tidak melakukan lagi tindak pidana baru.

Pasal 48 ayat (2) menentukan: Syarat-syarat lain yang dapat ditetapkan oleh pengadilan untuk penundaan pidana itu ialah:

- 1) pemberian ganti rugi (restitusi) oleh terpidana atas keuntungan materiil yang diperolehnya dari tindak pidana;
- 2) pembayaran ganti kerugian (kompensasi) atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya; atau
- 3) memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

Ketentuan yang terdapat dalam KUHP Yugoslavia mengenai kemungkinan diberikannya ganti rugi pada korban pada prinsipnya sama dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 14c ayat (1) KUHP Indonesia dimana pemberian ganti rugi tergantung sungguh pada pandangan hakim untuk menjatuhkan/menetapkan perlu tidaknya pemberian ganti rugi kepada korban.

Kemungkinan lain untuk memberikan ganti kerugian pada korban menurut KUHP Yugoslavia adalah yang diatur dalam pasal 50B yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan teguran judicial.

Pasal 50 B menentukan:

1. Untuk delik-delik yang diancam pidana penjara maksimum sampai 1 tahun atau diancam pidana denda, apabila dilakukan dalam keadaan-keadaan yang meringankan sehingga membuat delik itu menjadi ringan.
2. Untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara lebih berat dari 1 tahun, apabila persyaratan UU untuk menjatuhkan tindakan ini telah terpenuhi.
3. Berdasarkan syarat-syarat pada ayat (1), teguran judicial ini juga dapat dijatuhkan untuk perbarengan tindak pidana.
4. Dalam menetapkan apakah peringatan judicial dijatuhkan, pengadilan akan mempertimbangkan:
  - riwayat hidup si pelaku, apakah pernah dipidana, sebelumnya pernah dikenakan peringatan judicial, motif motif dalam melakukan tindak pidana, kesiapan si pelanggar memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya, dan keadaan-keadaan lain yang berhubungan dengan pribadinya<sup>50</sup>. (garis bawah oleh penyusun)

### 3. New Zealand

Sejak tahun 1964 New Zealand telah membentuk suatu badan yang akan menangani masalah pemberian kompensasi kepada korban.

Badan yang diberi nama "Crimes Compensation Tribunal" ini dibentuk berdasarkan Criminal Injuries Compensation Act tahun 1963. Tugas dari Crimes Compensation Tribunal adalah mempertimbangkan kemungkinan diberikannya kompensasi kepada korban sekaligus menjadi Komisi Penyelidik ("Commission of Inquiry") dari kasus-kasus yang terjadi.

Crimes Compensation Tribunal berwenang memberikan kompensasi kepada orang yang terluka atau terbunuh dalam kasus-kasus antara lain: perkosaan, persetubuhan/pencabulan terhadap gadis di bawah 12 tahun, penyerangan melanggar kesusilaan/perbuatan tidak senonoh, pembunuhan dengan sengaja/tidak sengaja (selesai atau tidak selesai), penganiayaan/melukai dengan sengaja, penyerangan berat, penyerangan kepada anak-anak, penembakan senjata api atau dengan melakukan perbuatan berbahaya, meracun dengan sengaja, penculikanwanita/gadis, penculikan anak.

Kompensasi yang dapat diberikan adalah untuk biaya-biaya/ongkos yang dikeluarkan, kerugian-kerugian keuangan, rasa sakit dan penderitaan korban. Kompensasi dibatasi pada kerugian/kerusakan pada orang/korban itu sendiri ("personal injuries") bukan pada kerugian/kerusakan kekayaan ("loss or damage to property")<sup>51</sup>. Alasan

---

<sup>50</sup> Ibid; hal. 96-97.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal. 65.

diberikannya kompensasi oleh negara kepada korban, sekaligus menjadi latar belakang lahirnya "Criminal Injuries Compensation Act menurut Bruce J. Cameron adalah lebih didasarkan pada kewajiban/tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk dari pada pertanggungjawaban negara atas kegagalan melakukan pencegahan kejahatan".<sup>52</sup>

Dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP Yugoslavia, ketentuan mengenai perlindungan korban/pemberian ganti rugi di New Zealand jauh lebih baik karena di Yugoslavia pengaturan pemberian ganti rugi masih tergantung pada penilaian hakim dan yang diperintahkan untuk membayar ganti rugi adalah pelaku tindak pidana sedangkan di New Zealand, pemberian ganti rugi telah ditangani oleh badan khusus yang dibentuk untuk itu dan yang akan memberikan ganti rugi/kompensasi adalah negara. Adanya pemberian ganti rugi/kompensasi yang diberikan oleh negara ini memberi jaminan bagi korban bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi yang dimaksud apabila telah mendapat persetujuan dari "Crimes Compensation Tribunal".<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ibid hal. 64

<sup>53</sup> Ibid hal. 64

#### 4. Inggris

Di Inggris juga terdapat badan yang akan menangani masalah pemberian kompensasi kepada korban yaitu The Criminal Injuries Compensation Board (CICB). Badan inilah yang akan menentukan diberikan atau tidaknya kompensasi pada korban karena tidak semua korban kejahatan secara otomatis akan menerima kompensasi dari negara, hanya korban kejahatan yang memang perlu/pantas ditolong saja yang akan menerima kompensasi dari negara.

The Criminal Injuries Compensation Board menetapkan kompensasi untuk “personal injury” yang diakibatkan langsung oleh : (1) tindak pidana; (2) tindakan penahanan (terdakwa/tersangka); (3) tindakan pencegahan kejahatan; (4) tindakan membantu polisi dalam upaya melakukan penangkapan/penahan terdakwa/tersangka, atau membantu polisi dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan.<sup>54</sup>

Melihat kategori korban yang dapat menerima kompensasi dari negara seperti yang dikemukakan di atas, dapat kita lihat bahwa sebenarnya pengertian korban yang dimaksudkan tidak terbatas pada korban kejahatan/tindak pidana saja melainkan juga orang-orang yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat membantu polisi

---

<sup>54</sup> Ibid. hal. 66.

dalam menemukan, menangkap, menahan tersangka atau terdakwa serta orang-orang yang menderita kerugian/penderitaan karena membantu polisi dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan akan dapat memperoleh kompensasi dari negara.

Dasar pemikiran dari disediakannya kompensasi oleh negara kepada korban kejahatan di Inggris adalah dalam rangka bagian dari kewajiban sosial atau kebijakan sosial dan sebagai perluasan dari sistem kesejahteraan.<sup>55</sup> Jadi bukan karena negara mempunyai kemampuan untuk membayar atau karena negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga negaranya.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan di beberapa negara yang memberikan perhatian pada korban kejahatan khususnya yang mengatur tentang ganti rugi/kompensasi, maka tampak bahwa:

1. Ada negara yang hanya memberikan kewenangan itu pada hakim untuk menetapkan memerintahkan kepada terdakwa/terpidana untuk membayar ganti rugi atau memperbaiki kerusakan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, Negara yang membuat kebijakan seperti ini misalnya Yugoslavia;
2. Ada negara yang memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada

---

<sup>55</sup> Ibid. hal. 65.

hakim untuk tidak saja dapat memerintahkan kepada terdakwa/terpidana membayar ganti rugi kepada korban atau memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, tetapi hakim juga diberi kewenangan untuk menetapkan bahwa uang denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa/terpidana, sebagian atau seluruhnya diserahkan kepada korban. Demikian juga halnya dengan uang hasil lelang dari barang sitaan dapat diputuskan untuk diserahkan pada korban baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya. negara yang membuat kebijakan seperti ini misalnya Portugal.

3. Ada pula negara yang telah membentuk lembaga khusus untuk menangani masalah pemberian ganti rugi/kompensasi kepada korban dengan mendapat dana untuk dari negara. Negara yang membuat kebijakan seperti ini misalnya New Zealand dan Inggris.

Dari beberapa negara sebagai bahan perbandingan dengan KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang ini dapat kita katakan bahwa KUHP Indonesia pada dasarnya sama dengan ketentuan yang ada dalam KUHP Yugoslavia. Perbedaan antara ketentuan yang ada dalam KUHP Indonesia dengan ketentuan yang ada dalam KUHP Yugoslavia yang menyangkut perlindungan korban khususnya yang menyangkut ganti rugi adalah adanya ketentuan sanksi teguran/peringatan judicial dalam KUHP Yugoslavia, dimana salah satu syarat untuk dapat



menjatuhkan teguran/peringatan judisial adalah kesediaan untuk membayar ganti rugi pada korban. Hal semacam ini tidak ada dalam KUHP Indonesia. Baik dalam KUHP Yugoslavia maupun dalam KUHP Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kemungkinan negara memberikan kompensasi kepada korban, kecuali dalam ketentuan KUHP dengan melalui proses pemeriksaan Praperadilan dimungkinkan negara membayar ganti kerugian kepada tersangka/terdakwa yang ditangkap, ditahan atau diadili tidak sesuai dengan atauran hukum yang berlaku atau karena kesalahan hukum yang diterapkan atau karena kekeliruan orangnya.

Dalam menghadapi perkembangan yang terjadi sekarang baik perkembangan dari tuntutan adanya perhatian dari negara terhadap warga negaranya khususnya bagi korban kejahatan maupun perkembangan dari tindak pidana itu sendiri yang membawa akibat timbulnya korban yang lebih luas, maka sudah saatnya negara dengan kebijakan pidananya mengatur kepentingan /perlindungan korban melalui pemberian ganti rugi oleh terdakwa atau terpidana maupun pengaturan pemberian kompensasi oleh negara kepada korban.

Kalau diperhatikan kondisi saat ini maka memang harus diakui bahwa kemampuan negara untuk menyediakan dana kompensasi untuk korban terasa sangat memberatkan pemerintah. Tetapi harus diingat juga

bahwa Kebijakan pidana yang dibuat bukanlan dimaksudkan untuk waktu yang singkat melainkan untuk jangka waktu yang lama dan pada suatu saat negara akan mampu memberikan dana kompensasi kepada korban atau mungkin negara menggalang dana sosial dari masyarakat untuk membantu para korban kejahatan atau sebagian dari pidana denda yang dijatuhkan itu diserahkan/disediakan untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan yang sangat perlu/pantas untuk diperhatikan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Formulasi Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif ini sering juga disebut dengan istilah “kebijakan formulatif”.<sup>51</sup>

Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, maka kebijakan formulasi/kebijakan legislatif merupakan salah satu dari serangkaian proses kebijakan hukum pidana. Disamping kebijakan formulasi/legislatif, masih ada proses kebijakan lainnya yaitu kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi. Mengenai hal ini Barda Nawawi Arief menulis<sup>52</sup> bahwa dalam ketiga tahap kebijakan penegkan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan /kewenangan, yaitu **kekuasaan legislatif/formulatif** dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; **kekuasaan yudikatif/aplikatif** dalam menerapkan hukum pidana dan **kekuasaan eksekutif/administratif** dalam melaksanakan hukum pidana.

Dalam kesempatan lain Barda Nawawi Arief menulis<sup>53</sup> perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap:

1. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang,

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit. 1996, hal. 245

<sup>52</sup> Ibid, hal. 30

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, dalam Muladi dan Barda Nawawi-Arief, Op. Cit. Hal. 173.

2. tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan, dan
3. tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Sebagai salah satu dari serangkaian proses kebijakan hukum pidana, kebijakan formulasi/kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis. Dikatakan demikian karena kebijakan formulasi/legislatif akan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan aplikasi/yudikatif dan arah kebijakan eksekusi/administrasi. Oleh karena itu jika terjadi kesalahan dalam menetapkan arah kebijakan formulasi/legislatif, maka akan membawa pengaruh pula dalam menentukan arah/menerapkan kebijakan yudikatif/aplikasi dan arah kebijakan eksekusi/administrasi. Hal ini bisa terjadi karena menurut Barda Nawawi Arief,<sup>54</sup> kebijakan formulasi/legislatif menjadi landasan legalitas dalam aplikasi hukum pidana disamping masalah efektivitas dan kegunaannya.

Masalah pokok yang berkaitan dengan kebijakan formulasi/legislatif hukum pidana adalah menyangkut masalah penentuan perbuatan apa yang akan dilarang atau yang harus dilakukan yang diancam dengan pidana, masalah penentuan pidana dan masalah pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.

Jika kebijakan formulasi/legislatif dalam hukum pidana dihubungkan dengan masalah perlindungan korban, maka ia berada pada kebijakan penentuan pidana, karena dalam kebijakan penentuan pidana ini akan ditentukan pidana atau tindakan apa yang akan diberikan kepada pelaku.

---

<sup>54</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hal. 53

tindak pidana sesuai dengan kadar kesalahan dan bobot perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>55</sup>

Dalam rangka peninjauan yang lebih luas dari upaya penanggulangan kejahatan yang berpijak dari perspektif korban, maka dalam kebijakan legislatif/formulatif, kepentingan korban harus juga mendapat perhatian karena seperti apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie<sup>56</sup> setiap kali terjadi pelanggaran hukum, maka ada pihak-pihak yang dilanggar haknya dan ada pula pihak yang melanggar kewajibannya. Apabila proses peradilan pidana dimaksudkan untuk benar-benar menanggulangi masalah kejahatan sebagai masalah sosial, maka kedua pihak, yaitu pelaku dan korban, mau tidak mau haruslah sama-sama diperhatikan sesuai dengan peranan mereka masing-masing dalam proses peradilan pidana.

Ini berarti bahwa dalam penentuan pidana/tindakan yang akan dijatuhkan pada si pelaku tindak pidana berkaitan pula dengan tujuan dari penjatuhan pidana yang di dalamnya termasuk juga tujuan untuk memberikan perlindungan pada korban.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak terdapat rumusan tentang apa yang menjadi tujuan dari ppidanaan dan biasanya tujuan pidana ini dibahas secara teoritis.

---

<sup>55</sup> Hal ini sesuai dengan pengertian hukum pidana yang diberikan oleh Moelyatno yang antara lain menyatakan bahwa hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moelyatno, ibid, hal. 1).

<sup>56</sup> Jimly Assiddiqie, Op.cit hal. 183.

Secara tradisional, teori-teori tentang tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 kelompok teori, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vervelgings theorien*);
  2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorien*).<sup>57</sup>
1. Teori absolut/pembalasan; menurut teori ini dasar hukum dari penjatuhan pidana adalah untuk pembalasan. Pidana diberikan sebagai konsekwensi logis dari kejahatan yang dilakukan. Teori absolut ada yang bersifat subyektif yaitu pembalasan yang ditujukan pada kesalahan pelaku karena tercelanya perbuatan itu, dan teori absolut yang bersifat obyektif yaitu pembalasan yang ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.<sup>58</sup>
  2. Teori Relatif/Teori tujuan; Menurut teori ini dasar hukum penjatuhan pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat serta memperbaiki pelaku tindak pidana. Dalam teori relatif/tujuan terdapat aliran pemikiran yang bervariasi yaitu:
    - a. Generale Preventie. Menurut aliran ini tujuan pokok pidana adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada masyarakat agar semua orang tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.
    - b. Speciale Preventie. Menurut aliran ini tujuan pidana adalah untuk mencegah si pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana lagi.

<sup>57</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal. 10.

<sup>58</sup> Bambang Poernomo; Op.Cit. hal. 27.

- c. Memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut alairan ini tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik yang dilakukan dengan cara *reclassering*.

Sejalan dengan tujuan penjatuhan pidana berdasar terori relatif/teori tujuan tersebut di atas, H.A. Djazuli menulis,<sup>59</sup> dalam hukum Islam, memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cermin dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberikan pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya. Sementara itu salah satu laporan simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 disebutkan:

1. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

---

<sup>59</sup> H.A. Djazuli: *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 26-27.

2. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
  - a. *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
  - b. *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
  - c. *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh si **terhukum** maupun oleh **korban** ataupun oleh **masyarakat**.<sup>60</sup>

Di samping teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, muncul teori gabungan yang berpandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan dengan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur dengan tanpa menghilangkan unsur yang lainnya atau mewujudkan semua unsur yang ada yaitu unsur pembalasan dan unsur ketertiban masyarakat.

Meskipun dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak terdapat rumusan tujuan pemidanaan tetapi dalam perkembangan sekarang telah disadari bahwa tujuan pemidanaan itu perlu dirumuskan secara jelas dalam KUHP masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam Konsep Rancangan KUHP nasional Tahun

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit. 1996, hal. 82.



2000 telah dimasukan tujuan dari pembedaan yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 50 Konsep RKUHP yang berbunyi :

(1) Pembedaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Meskipun dalam tujuan pembedaan sebagaimana disebutkan di atas tidak tercantum secara tegas tentang adanya perhatian pada perlindungan korban, namun demikian dalam Konsep KUHP sebenarnya secara tersirat telah ada upaya perlindungan pada korban. Tujuan pembedaan berupa “ menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat” merupakan rambu/isyarat yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memberikan perhatian dan perlindungan pada korban. Konflik yang timbul akibat dari suatu tindak pidana tidak akan selesai hanya dengan menjatuhkan hukuman pada terpidana tanpa memberikan suatu perasaan puas dari si korban dalam pengertian

bahwa kerelaan korban untuk menerima kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana dan memberinya maaf merupakan unsur utama dari meniadakan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Kerelaan korban untuk secara suka rela untuk memaafkan pelaku tindak pidana /terpidana akan sulit diperoleh tanpa ada prestasi yang diberikan oleh terpidana baik atas perintah/putusan hakim maupun atas inisiatif dari terpidana itu sendiri. Prestasi yang dimaksud disini adalah prestasi berupa pemberian sesuatu kepada korban, melakukan sesuatu untuk korban atau mengajukan permohonan maaf kepada korban. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka tujuan menghilangkan konflik yang terjadi akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat akan dapat tercapai. Dengan demikian tujuan pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas tidak hanya dapat diwujudkan dengan memperhatikan kepentingan hukum adat tetapi juga untuk anggota masyarakat secara individu yang telah menjadi korban.

Harus diingat pula bahwa meskipun yang menjadi korban kejahatan adalah hanya satu orang tetapi rasa kekeluargaan dan solidaritas kedaerahan dapat menyebabkan timbulnya suatu gejolak dalam masyarakat jika masalah korban tindak pidana tidak mendapatkan perhatian dan perlindungan dalam proses peradilan pidana.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, meskipun dalam rumusan Konsep RKUHP Tahun 2000 tidak dirumuskan secara eksplisit tentang

perlindungan korban sebagai salah satu tujuan pemidanaan, namun demikian dalam Konsep RKUHP sudah terlihat adanya keinginan untuk memberikan perlindungan pada korban. Hal ini terlihat di dalam rumusan tentang jenis-jenis pidana dan dalam pedoman penjatuhan pidana.

Kembali pada masalah perlindungan korban dalam kebijakan formulasi/legislatif hukum positif Indonesia (KUHP), pengaturannya hanya dapat kita lihat dalam pasal 14c KUHP yaitu yang mengatur adanya kemungkinan bagi hakim untuk menetapkan agar terdakwa/terpidana memberikan penggantian kerugian pada korban.

Pasal 14c ayat (1) berbunyi: Dalam perintah yang dimaksud dalam pasal 14a. kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.

Dari rumusan pasal 14c ayat (1) tersebut di atas tampaknya syarat penggantian kerugian oleh terdakwa/terpidana kepada korban itu sifatnya hanya sebagai syarat tambahan yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat artinya bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat tidak mesti harus disertai dengan kewajiban bagi hakim untuk memerintahkan pemberian ganti kerugian oleh terdakwa/terpidana kepada korban. Dengan demikian perintah pemberian ganti rugi tergantung sungguh pada kebijakan dan pengertian hakim terhadap penderitaan yang dialami oleh korban. Adanya kemungkinan

pemberian ganti rugi yang diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP bukanlah dimaksudkan sebagai perlindungan kepada korban melainkan untuk kepentingan terpidana seperti yang dikatakan oleh Roeslan Saleh; ketentuan-ketentuan mengenai pidana bersyarat, dan juga pelepasan bersyarat, semuanya ini mengandung tendensi-tendensi individualisasi dari reaksi dan usaha-usaha untuk menyesuaikan pelaksanaan dari pidana atau tindakan itu kepada diri terhukum.<sup>61</sup> Sementara itu Muladi menyatakan bahwa penerapan pidana bersyarat diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Pidana bersyarat tersebut, di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
2. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;

<sup>61</sup> Roeslan Saleh: *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*; Sinar Grafika, Jakarta, 1988; hal. 19.

<sup>62</sup> Muladi, Op.Cit. hal. 197.

5. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
6. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Dengan pengaturan yang berorientasi pada pelaku seperti ini dapat dikatakan bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini masih kurang memberikan perhatian pada masalah perlindungan korban. Hal ini sebenarnya dapat dipahami karena KUHP yang sedang berlaku sekarang ini lebih banyak memberikan perhatian pada perlindungan ketertiban masyarakat secara keseluruhan dan tidak memberikan perlindungan secara langsung/konkrit pada kepentingan perorangan.

Dengan pemberian perlindungan pada ketertiban masyarakat itulah maka pertanggungjawaban pidana dari pelaku bukan karena pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar hak seseorang secara perorangan melainkan pertanggungjawaban karena kesalahannya mengancam dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini,

berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “in abstracto” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.<sup>63</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual itu sebenarnya terkandung juga perlindungan korban secara tidak langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban potensial.

Meskipun dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya memberikan perhatian yang tidak langsung pada korban, yang hanya memberikan sedikit kemungkinan untuk memperoleh ganti rugi karena kurangnya perhatian pada korban konkrit yang telah menderita akibat dari suatu tindak pidana, tetapi dalam perkembangan kebijakan formulasi/ legislatif di Indonesia belakangan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam memberikan perhatian dan perlindungan pada korban terutama yang menyangkut pemberian ganti rugi kepada korban, baik kepada korban individual (perorangan) maupun kepada korban kolektif (kelompok, masyarakat, atau negara). Hal ini terlihat dalam peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-undang No. 7 Drt. Tahun 1955 (UU tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi)

Dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 memuat aturan tentang kemungkinan dijatuhkan pidana tambahan dan tindakan tata tertib oleh hakim kepada terpidana. Ketentuan ini merupakan perluasan dari ketentuan yang ada dalam pasal 10 KUHP yang hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Tetapi penambahan semacam ini tidak

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal 55

bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam KUHP karena dalam pasal 103 dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini (buku I, pen.) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Hanya saja penambahan hukuman dengan tindakan-tindakan tata-tertib, yang dengan demikian merupakan suatu perluasan dengan kewenangan di luar hukuman mengakibatkan batas-batas kewenangan dari hakim pidana menghadapi suatu *vervaging*. Dan jikalau terdapat suatu kewenangan pada hakim untuk mengadakan suatu kombinasi hukuman dengan tindakan, maka juga perbatasan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan akan menjadi samar-samar.<sup>64</sup> Dengan adanya penambahan semacam ini kewenangan dari hakim diperluas untuk memberikan perlindungan pada korban.

Diantara tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan itu ada yang dapat dikategorikan sebagai aturan yang berorientasi pada korban yaitu berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, atas biaya terhukum, sekedar hakim tidak menentukan lain (pasal 8d). Meskipun ketentuan ini telah memberikan landasan hukum bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan tata tertib yang akan membawa kepada perlindungan korban, tetapi ketentuan

<sup>64</sup> Oemar Seno Adji: *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*; cet. ke-2, Erlangga, Jakarta, 1976, 170.

dalam Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 masih bersifat pilihan/fakultatif bagi hakim dan dengan demikian tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan tata tertib terhadap terdakwa. Namun demikian walaupun bersifat fakultatif, namun kedudukannya lebih baik dibandingkan ganti rugi menurut pasal 14c KUHP di atas, karena "tindakan tata tertib" ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.<sup>65</sup>

2. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) terdapat juga pengaturan pidana yang berorientasi pada perlindungan korban. Hal ini terlihat dalam pasal 47 Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) yang menentukan: "Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
  - b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
  - c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
  - d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
  - e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
  - f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama (3) tahun.

Perlindungan korban dalam ketentuan di atas, dirumuskan dengan kata-kata "perbaikan akibat dari tindak pidana". Sebenarnya "mewajibkan

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief; Ibid. hal. 57.



mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, atau meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak” dapat juga dikatakan sebagai suatu tindakan yang berorientasi pada perlindungan korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan membawa kearah perlindungan masyarakat (korban kolektif) yang dirugikan akibat dari suatu tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997), tindakan tata tertib termasuk salah satu tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersama-sama dengan pidana lainnya terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana lingkungan. Pengaturan seperti ini, meskipun sifatnya fakultatif (tergantung pada pandangan hakim) tetapi telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi hakim. Tanpa adanya pengaturan yang demikian maka hakim tidak akan mungkin dapat menjatuhkan tindakan tata tertib karena terhalang oleh adanya asas legalitas dalam hukum pidana.

### 3. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) terdapat ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai aturan yang bersifat melindungi kepentingan dari korban tindak pidana.

Pasal 18 ayat (1) menentukan: Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2): Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) dapat dikatakan sebagai suatu undang-undang yang mengatur lebih banyak dan lebih lengkap tentang perlindungan korban kejahatan dari tindak pidana korupsi. Dikatakan lebih banyak mengatur tentang kepentingan korban oleh karena pidana yang diancamkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan secara kumulatif dan kumulatif alternatif artinya pidana yang diancamkan itu gabungan antara pidana penjara dengan pidana denda atau salah satu dari pidana penjara atau pidana denda. Khusus untuk pidana denda semuanya akan masuk ke kas negara dan itu berarti kembali kepada korbannya karena korban dari tindak pidana korupsi adalah negara. Demikian juga halnya dengan semua ketentuan yang ada dalam pidana tambahan dapat dikatakan semuanya untuk melindungi kepentingan korban (negara) dan kalau terdapat orang perorang yang dirugikan dalam tindak pidana korupsi maka perlindungannya terlihat pada perintah pembayaran uang pengganti yang harus di bayarkan pada korban.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga dikatakan paling lengkap oleh karena dalam hal-hal tertentu dalam undang-undang ini terdapat pedoman pemidanaan yang akan menjadi landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Misalnya dalam hakim memerintahkan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti kepada korban, maka hakim sekaligus dapat menetapkan bahwa harta benda milik terpidana

dapat dirampas untuk membayar uang pengganti. Jika terpidana tidak mampu atau tidak mau membayar uang pengganti, maka dalam putusan hakim harus ditentukan pula pidana penjara sebagai penggantinya.

Dengan adanya pedoman pemidanaan yang diatur khusus untuk pidana pembayaran uang pengganti seperti yang dikemukakan diatas, menunjukkan adanya keinginan keras untuk mengembalikan kerugian negara (korban) disatu pihak dan keinginan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di pihak lain. Pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat menghindarkan diri dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan dan mengganti kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

Ketentuan yang keras terhadap pelaku tindak pidana korupsi seperti yang dikemukakan di atas, di samping memiliki segi kebaikan mungkin juga akan membawa kerugian dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan kehidupan terpidana dan keluarganya dimasa depan.

Penderitaan yang dialami oleh terpidana dengan pidana yang dijatuhkan kepada dirinya dengan pidana penjara itu adalah hukuman yang pantas untuk diterimanya atas kesalahan yang telah dilakukannya, tetapi bagaimana dengan tindakan lain jika hukuman tambahan dijatuhkan. Suatu hal yang berlebihan jika pedoman pemidanaan yang berhubungan pembayaran uang pengganti harus dilaksanakan. Pertama yang akan dijalani adalah pidana penjara, harta benda hasil korupsi disita kemudian

harta milik terpidana yang bukan hasil korupsi disita untuk dilelang guna membayar uang pengganti dan terakhir kalau harta bendanya sudah habis dan belum cukup untuk membayar uang pengganti, maka pidana penjara sebagai gantinya. Pertanyaannya adalah apakah pidana yang dijatuhkan itu harus menderitakan terpidana beserta anak dan isterinya dengan jalan merampas semua hartanya baik yang diperoleh dari tindak pidana maupun yang menjadi milik pribadi bukan hasil korupsi. Ataukah ketentuan seperti ini hanya mau dijadikan sebagai pasal mati yang tidak akan dilaksanakan atau mungkinkah aturan yang keras seperti ini akan dapat dilaksanakan.

Pertanyaan tersebut diatas dikemukakan hanya untuk mengingatkan kita semua bahwa dalam penentuan jenis pidana dan beratnya ancaman pidana tidak melupakan tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana khususnya yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban. Ketidakadilan akan muncul jika hanya salah satu yang diutamakan dengan mengabaikan yang lainnya dengan kata lain dalam kebijakan hukum pidana harus tetap ada keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku dan kepentingan korban.

#### 4. Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 (Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen) diatur pula jenis sanksi pembayaran ganti rugi baik sebagai sanksi administrasi maupun sebagai pidana tambahan.

Pembayaran ganti rugi sebagai sanksi administrasi diatur dalam pasal 60 UU No. 8 Tahun 1999 yang menentukan bahwa sanksi administrasi berupa penempatan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagai pidana tambahan, pembayaran ganti rugi diatur dalam pasal 63 UU No. 8 Tahun 1999 yang menentukan bahwa : Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Pembayaran ganti rugi (kepada korban) sebagai suatu sanksi dalam undang-undang ini harus dipandang sebagai sanksi yang berusaha melindungi konsumen sebagai korban dari segi kerugian materil yaitu dengan cara membayar ganti kerugian. Selain itu pidana tambahan dalam undang-undang ini sebenarnya lebih banyak memberikan perlindungan kepada korban dari segi perlindungan preventif (kepada masyarakat) dan agar orang tidak menjadi korban kedua kalinya, yaitu dengan cara memerintahkan perampasan barang tertentu, penghentian kegiatan yang

menyebabkan timbulnya kerugian penarikan barang dari peredaran serta pencabutan izin usaha. Tanpa adanya perintah/pidana tambahan sebagaimana disebutkan di atas, maka masyarakat akan banyak menjadi korban dan orang yang telah menjadi korban akan menjadi korban kembali.

#### 5. Undang-undang No. 26 Tahun 2000

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), pengaturan perlindungan korban diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

##### Pasal 34 :

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

##### Pasal 35:

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana disebut dalam dua pasal tersebut di atas, maka korban dari pelanggaran hak asasi manusia akan memperoleh perlindungan yang menyeluruh, baik perlindungan fisik maupun perlindungan psikis, berupa jaminan keamanan serta jaminan untuk

memperoleh ganti rugi baik dengan kompensasi, restitusi dan atau dengan rehabilitasi.

Kebijakan perlindungan korban yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, merupakan suatu kemajuan yang luar biasa karena para korban mendapat jaminan langsung dari peraturan perundang-undangan dan sifatnya mutlak jika terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan korban dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam arti bahwa pelaku pelanggaran HAM telah terbukti atas kesalahannya.

Jika dibandingkan antara ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan pengaturan perlindungan korban dalam peraturan perundang-undangan lainnya, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan perlindungan korban dalam Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia lebih lengkap dan lebih baik karena:

- a. Undang-undang Pengadilan HAM memberikan perlindungan sejak saat diketahui adanya pelanggaran HAM yaitu dengan memberikan perlindungan keamanan dari ancaman dan teror dari pihak lain. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, perlindungan hanya mungkin diberikan setelah hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa penggantian kerugian atau membayar uang pengganti atau memperbaiki kerusakan akibat dari tindak pidana. Jadi tidak perlindungan keamanan yang diberikan oleh peraturan perundangan diluar Undang-undang Pengadilan HAM.



- b. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Pengadilan HAM bersifat imperatif dalam arti bahwa perlindungan itu harus diberikan secara menyeluruh dan tidak bersifat fakultatif seperti dalam undang-undang lain.
- c. Dalam Undang-undang Pengadilan HAM, penggantian kerugian tidak saja menjadi tanggung jawab pelaku melalui restitusi, tetapi negara juga ikut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi jika si pelaku pelanggaran HAM tidak mampu membayar restitusi kepada korban, bahkan negara akan merehabilitir para korban pelanggaran HAM. Hal ini berbeda dengan pengaturan pemberian ganti rugi kepada korban yang hanya menjadi tanggung jawab pelaku.

6. Undang-undang No. 8 Tahun 1981.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kemungkinan bagi korban untuk memperoleh pembayaran ganti rugi baik dari negara sebagai akibat dari kesalahan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, maupun dari pelaku tindak pidana yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi korban. Kemungkinan bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian dalam perkara pidana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan

tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 95 KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa untuk dapat memperoleh ganti kerugian akibat kekeliruan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, pihak korban dapat menempuh dua jalur yang sesuai dengan proses yang telah dilaluinya dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang menyebabkan ia ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di sidang pengadilan. Jika terjadi korban karena salah tangkap, salah tahan atau dikenakan tindakan lain (pengeledahan atau penyitaan yang tidak sah) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, tuntutan ganti rugi diajukan melalui sidang praperadilan. Jika perkara pidana, pidananya telah sampai pada tingkat pemeriksaan dan diputus di sidang pengadilan, maka permohonan ganti kerugian akan diberikan melalui putusan bersamaan dengan putusan perkara pidana.

- b. Pasal 97 yang mengatur tentang perlindungan korban dalam pengertian yang lebih luas yaitu yang menyangkut pengembalian nama baik, status

seseorang dalam masyarakat. Perlindungan seperti ini dilakukan dengan memberikan rehabilitasi terhadap korban. Seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap berhak untuk memperoleh rehabilitasi yang langsung dicantumkan dalam putusan pengadilan yang menyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut. Jika perkara pidananya tidak sampai diajukan ke pengadilan, rehabilitasi diajukan melalui praperadilan (pasal 97 ayat (3)).

Korban yang berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 95 dan pasal 97 KUHAP seperti yang dikemukakan di atas bukanlah korban yang terjadi akibat dari suatu tindak pidana melainkan korban yang timbul akibat kelalaian aparat atau karena penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Di samping itu terdapat juga kemungkinan bagi korban dari suatu tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku yang diatur dalam KUHAP yaitu melalui permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana.

Dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana itu.

Ketentuan pasal 98 ayat (1) KUHAP sebenarnya menyangkut ganti kerugian yang dilihat dari sudut pandang hukum perdata yang proses gugatannya digabungkan/melalui proses perkara pidana. Oleh karena itu sistem pembuktian tentang adanya kerugian dan penyebab kerugian itu menggunakan sistem pembuktian perdata. Tetapi karena gugatan permohonan ganti kerugian ini digabungkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana maka dalam hal-hal tertentu acara pemeriksaan perdata dikesampingkan karena harus mengikuti acara pemeriksaan perkara pidana. Misalnya, dalam upaya mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding, gugatan ganti kerugian harus mengikuti acara pemeriksaan perkara pidana dalam pengertian jika perkara pidana tidak diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, maka permohonan ganti kerugian tidak boleh mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding.

Ganti rugi yang dimohonkan melalui penggabungan dengan acara pemeriksaan pidana telah diberi batasan-batasan tertentu yaitu hanya sebatas penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana (pasal 99 ayat (2)). Pihak yang mengajukan permohonan ganti kerugian (korban) tidak dapat menuntut ganti kerugian lain selain dari penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk memperbaiki segala kerusakan atau penderitaannya.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, dimaksudkan supaya gugatan perkara ganti kerugian dapat diperiksa dan diputus pada saat yang sama dengan pemeriksaan dan pengambilan putusan

perkara pidana yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Hal ini sepiantas dilihat sebagai hal yang memudahkan bagi korban serta dapat meringankan beban pembuktian karena jika terdakwa telah diputus bersalah dalam perkara pidana maka gugatan ganti kerugian akan diterima asal saja hakim yang memeriksa perkara tersebut berwenang mengadili perkara gugatan ganti kerugian serta dasar gugatannya benar yaitu ganti rugi yang dituntut adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban akibat dari perbuatan terdakwa/terpidana. Namun demikian jika diperhatikan secara sungguh-sungguh, penggabungan acara pemeriksaan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana lebih banyak merugikan korban. Kerugian yang dimaksud adalah :

- a. Dalam hal besarnya jumlah ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban, telah dibatasi oleh aturan hukum yaitu hanya sekedar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.
- b. Dalam hal korban merasa tidak puas dengan putusan hakim tentang ditolaknya gugatan atau hakim merasa dirinya tidak berwenang memeriksa perkara gugatan ganti kerugian, maka pemohon/korban tidak dapat mengajukan perlawanan/banding jika perkara pidannya tidak diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding.
- c. Dalam hal pemohon/korban merasa puas atas putusan hakim yang menyangkut gugatan ganti kerugian tetapi proses pemeriksaan perkara pidana berlanjut sampai ke tingkat banding, maka dengan sendirinya

permohonan ganti kerugian juga akan ikut diperiksa dan diputus pada tingkat banding.

Kenyataan di atas merupakan suatu bentuk kebijakan yang kurang adil sekaligus mengandung diskriminasi jika dilihat dari prespektif korban sebagai pihak yang dirugikan. Karena, jika pihak korban tidak setuju atas putusan ganti kerugian yang telah diputuskan oleh pengadilan, maka korban dalam hal ini tidak mempunyai upaya hukum untuk mengadakan perlawanan atas putusan tersebut, hanya bisa pasrah. Sedangkan kepada pihak tergugat (terdakwa), oleh undang-undang justeru diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukan banding.<sup>66</sup>

Dengan demikian gabungan perkara gugatan ganti kerugian tidak dimaksudkan untuk memberikan perhatian pada kerugian dan penderitaan korban melainkan semata-mata hanya untuk mempermudah cara kerja hakim dalam memeriksa suatu perkara.

## **B. Pelaksanaan Perlindungan Korban Dalam Penerapan Hukum Pidana**

Seperti yang telah dikemukakan pada sub bab kebijakan legislatif hukum pidana positif Indonesia, bahwa kesalahan dalam kebijakan formulasi/legislatif akan membawa kesalahan pula dalam kebijakan yudikatif/aplikasi dan pada kebijakan eksekusi/administrasi. Dengan demikian kebijakan yudikatif/aplikasi sangat ditentukan oleh kebijakan formulasi/legislatif.

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini (cet. ketiga), Jakarta, 1993, hal. 608-609.

Dalam melihat pelaksanaan perlindungan korban dalam penerapan hukum pidana di Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari masalah bagaimana pengaturan perlindungan korban dalam kebijakan formulasi/legislatif.

Dilihat secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan korban khususnya perlindungan dalam arti pengaturan pemberian ganti rugi pada korban dalam kebijakan formulasi/legislatif telah menunjukkan adanya kemajuan. Tetapi hal itu khusus untuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Pengaturan pemberian ganti rugi yang terdapat dalam KUHP masih belum berubah, artinya ketentuan mengenai pemberian ganti rugi pada korban masih terbatas pada ketentuan pasal 14c-KUHP yang hanya memberi kemungkinan untuk menetapkan pemberian ganti pada korban jika hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat serta mencantumkannya sebagai salah satu syarat khusus yang harus dilaksanakan oleh terpidana.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya peningkatan terjadinya kejahatan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan yang lebih banyak menimbulkan korban adalah kejahatan-kejahatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Hal ini akan membawa konsekuensi bahwa korban kejahatan semakin banyak yang menderita sementara pengaturan pemberian ganti rugi dalam KUHP tidak berubah dengan sendirinya akan memperkecil kemungkinan penjatuhan putusan pemberian ganti rugi pada korban.

Dengan demikian penjatuhan pidana/ tindakan oleh hakim tergantung pada peraturan perundang-undangan pidana yang ada serta bagaimana

pandangan hakim terhadap perlunya keseimbangan dalam memperhatikan kepentingan pelaku, masyarakat dan korban. Hakim sebagai salah satu komponen dari penegakan hukum memainkan peranan yang penting dalam usaha memberikan perhatian pada korban. Hal ini penting untuk diperhatikan karena bagaimanapun baiknya peraturan perundang-undangan hukum pidana mengatur tentang pemberian ganti rugi pada korban tetapi pada akhirnya akan tergantung pada aparat penegak hukum yang akan melaksanakannya. Hal ini telah dikemukakan oleh Wolf Middendorf yang menyatakan bahwa keseluruhan efektifitas peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu: adanya undang-undang yang baik (*good legislation*); pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*).<sup>67</sup>

Dari sisi pengaturan pemberian ganti rugi dalam KUHP sekarang dihubungkan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang sebagian besar adalah kejahatan-kejahatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP maka akan terlihat bahwa pidana yang banyak dijatuhkan oleh hakim adalah pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara atau pidana kurungan dengan maksud menempatkan pelaku dalam lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku, sedangkan penjatuhan pidana bersyarat sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan pembayaran ganti rugi sebagai syarat khusus masih belum mendapat perhatian yang serius dari para hakim. Hal ini

---

58. Wolf Middendorf: dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal. 200



terlihat pada hasil putusan pengadilan di Nusa Tenggara Barat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 seperti yang terlihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 : Jumlah Putusan dan Jumlah Pidana Bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tahun 1998 s/d 2000.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Putusan</b>	<b>Pidana Bersyarat</b>	<b>Persentase ( %)</b>
<b>1998</b>	<b>145</b>	<b>18</b>	<b>12,4</b>
<b>1999</b>	<b>148</b>	<b>24</b>	<b>16,32</b>
<b>2000</b>	<b>112</b>	<b>12</b>	<b>10,71</b>
<b>Total</b>	<b>405</b>	<b>54</b>	<b>13,3</b>

**Sumber : Pengadilan Negeri Mataram.**

**Tabel 2 : Jumlah Putusan dan Jumlah Pidana Bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Praya tahun 1998 s/d 2000**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Putusan</b>	<b>Pidana Bersyarat</b>	<b>Persentase ( %)</b>
<b>1998</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	
<b>1999</b>	<b>152</b>	<b>2</b>	<b>1,32</b>
<b>2000</b>	<b>115</b>	<b>7</b>	<b>6,10</b>
<b>Total</b>	<b>377</b>	<b>9</b>	<b>2,39</b>

**Sumber : Pengadilan Negeri Praya.**

**Tabel 3 : Putusan dan Jumlah Pidana Bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tahun 1998 s/d 2000.**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Putusan</b>	<b>Pidana Bersyarat</b>	<b>Persentase ( %)</b>
<b>1998</b>	<b>102</b>	<b>15</b>	<b>7,43</b>
<b>1999</b>	<b>225</b>	<b>19</b>	<b>8,44</b>
<b>2000</b>	<b>147</b>	<b>9</b>	<b>6,12</b>
<b>Total</b>	<b>474</b>	<b>43</b>	<b>9,1</b>

**Sumber : Pengadilan Negeri Raba Bima**

Dari data yang tertera dalam tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 1998 telah diputus sebanyak 145 kasus diantaranya 18 kasus atau sama dengan 12 % yang diputus dengan penjatuhan pidana bersyarat. Kesemua putusan dengan penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak terdapat satu putusanpun yang menjatuhkan syarat khusus yang berupa perintah membayar ganti kerugian maupun syarat khusus lainnya. Pada tahun 1999 Pengadilan Negeri Mataram telah memeriksa dan memutus sebanyak 148 perkara diantaranya telah diputus 24 perkara atau sama dengan 16, 32 % dengan penjatuhan pidana bersyarat dan dari 24 perkara yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut tidak ada satu perkarapun yang dijatuhi perintah untuk melaksanakan syarat khusus baik berupa pembayaran ganti rugi maupun syarat khusus lainnya. Selanjutnya pada tahun 2000 telah diperiksa dan diputus sebanyak 112 perkara, 12 diantaranya dijatuhi pidana bersyarat, sama dengan 10, 71 %. Dari 12 perkara yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut tidak ada satu perkarapun yang dijatuhi perintah untuk melaksanakan syarat khusus baik berupa pembayaran ganti rugi atau syarat khusus lainnya. Semua putusan yang menjatuhkan pidana

bersyarat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 hanya diberikan syarat umum yaitu tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 1998, 1999 dan tahun 2000 terdapat 3 putusan yang menjatuhkan pidana berupa perintah membayar ganti kerugian yaitu 1 (satu) perkara diputus perintah membayar ganti kerugian karena adanya permohonan korban untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dan 2 (dua) perkara lainnya adalah perintah membayar uang pengganti dalam perkara korupsi. Disamping itu pengadilan Mataram dalam kurun waktu tersebut di atas telah menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terhadap 15 orang yaitu tahun 1998 diputus bebas 5 (lima) orang, tahun 1999 diputus bebas 2 (dua) orang dan pada tahun 2000 telah diputus bebas 8 (delapan) orang. Terhadap korban (penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum) yang diputus bebas oleh hakim, hanya diperintah untuk merehabilitasi para korban berupa memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Kenyataan yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram juga terjadi di Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah dimana ganti rugi kepada korban tidak pernah dijatuhkan oleh para hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

Dalam tabel 2 terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 hakim Pengadilan Negeri Praya hanya menjatuhkan 9 (sembilan) pidana bersyarat (2,39%) dari sebanyak 377 perkara yang diperiksa

dan diputus dengan rincian tahun 1998 telah diperiksa dan diputus sebanyak 111 perkara tanpa satupun yang dijatuhi pidana bersyarat. Tahun 1999 telah diperiksa dan diputus 152 perkara 2 perkara (1,32 %) diantaranya dijatuhi pidana bersyarat tanpa disertai dengan pidana tambahan baik berupa syarat membayar ganti rugi ataupun syarat khusus lainnya. Pada tahun 2000 telah diperiksa dan diputus sebanyak 115 perkara, diantaranya dijatuhi pidana bersyarat sebanyak 7 perkara ( 6,10 %) tanpa disertai dengan syarat khusus baik berupa membayar ganti kerugian maupun syarat khusus lainnya.

Di Pengadilan Negeri Raba-Bima nasib korban tidak berbeda dengan korban kejahatan di daerah-daerah lain yang tidak mendapat perhatian dalam proses peradilan pidana. Dari 474 perkara yang diperiksa dan yang diputus di Pengadilan Negeri Raba-Bima terdapat 43 perkara (9,1 %) diantaranya yang diputus dengan menjatuhkan pidana bersyarat dengan rincian tahun 1998 telah diperiksa dan diputus sebanyak 202 perkara, 15 perkara (7,43 %) diantaranya dijatuhi pidana bersyarat tanpa disertai dengan syarat khusus baik berupa perintah membayar ganti rugi maupun perintah melaksanakan syarat khusus lainnya. Pada tahun 1999 telah diperiksa dan diputus sebanyak 225 perkara, 19 perkara (8,44 %) dijatuhi dengan pidana bersyarat tanpa disertai dengan perintah melaksanakan syarat khusus. Pada tahun 2000 Pengadilan Negeri Raba-Bima telah memeriksa dan memutus sebanyak 147 perkara, 9 perkara (6,12 %) diantaranya dijatuhi pidana bersyarat dengan syarat umum tidak melakukan tindak pidana selama berada dalam masa percobaan, tanpa disertai

dengan perintah melakukan syarat khusus baik berupa membayar ganti rugi maupun syarat khusus lainnya.

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa ganti kerugian kepada korban individual tidak pernah dijatuhkan dalam putusan pengadilan kecuali satu yang diputus untuk membayar ganti kerugian kepada korban tetapi bukan dalam rangka sebagai syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat melainkan karena adanya permintaan korban melalui permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana.

Selain itu terdapat dua putusan yang menjatuhkan pidana membayar uang pengganti kepada negara (korban) dalam pemeriksaan perkara korupsi. Hanya saja dalam menjatuhkan pidana berupa perintah untuk membayar uang pengganti kepada negara (korban), hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak mengikuti pedoman penjatuhan pidana yang ada dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru (UU No. 39 Tahun 1999) yang menentukan bahwa jika terpidana tidak mau atau tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda milik terpidana disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan jika terpidana tidak memiliki harta maka akan diganti dengan pidana penjara. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan putusan membayar uang pengganti, langsung memutuskan jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka terpidana akan dikenakan pidana kurungan sebagai kurungan pengganti tidak membayar uang pengganti. Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang memerintahkan untuk membayar uang pengganti yang disertai dengan kurungan pengganti

akan membawa konsekwensi negara sebagai korban tidak akan mendapat uang pengganti seperti yang putusan oleh hakim apabila terpidana tidak bersedia membayar dan lebih memilih untuk menjalani kurungan sebagai penggantinya. Hal inilah yang dilakukan oleh 2 orang terpidana kasus korupsi yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram tahun 1998 dan tahun 2000. Akibat dari terpidana memilih untuk menjalani kurungan pengganti, maka negara sebagai korban menderita kerugian ganda yaitu tidak mendapat uang pengganti dan harus membiayai hidup terpidana selama berada dalam kurungan.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Praya dan Pengadilan Negeri Raba-Bima terdapat beberapa putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan pembebasan seperti ini terdapat juga unsur perlindungan yang diberikan oleh para hakim yaitu berupa perlindungan secara umum dengan memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengembalikan status mereka kembali ke sebelum disangka/didakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan cara memulihkan hak, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Bentuk perlindungan semacam ini, meskipun tidak memerintahkan untuk membayar ganti rugi tetapi sudah termasuk dalam perlindungan yang cukup luas cakupannya. Hanya saja putusan pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang tidak disertai dengan perintah membayar ganti kerugian ini termasuk putusan yang mengurangi perlindungan korban atau paling tidak akan memperpanjang jalan yang harus dilalui oleh korban akibat kesalahan

aparatus penegak hukum karena di dalam KUHAP sendiri telah ditentukan bahwa tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan atau diadili tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berhak untuk mendapat ganti kerugian (pasal 95 ayat 1) KUHAP). Seharusnya jika dalam suatu aturan hukum sudah ditentukan bahwa ganti kerugian itu sudah menjadi hak terdakwa, maka hakim yang membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum disamping memerintahkan untuk merehabilitasi terdakwa juga menetapkan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada terdakwa.

Kurangnya perhatian pada perlindungan korban kebijakan yudikatif/aplikatif tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Praya dan di Pengadilan Negeri Raba Bima, tetapi secara nasional terjadi juga hal yang demikian. Dalam Statistik Kriminal yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik tahun 1977 terlihat bahwa dari 21 kasus tindak pidana ekonomi, tidak satu putusanpun yang menetapkan adanya tindakan tata tertib yang dijatuhkan termasuk di dalamnya perintah untuk mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terdakwa. Demikian juga halnya dalam perkara tindak pidana korupsi, dari 19 kasus yang diputus, tidak ada satu putusanpun yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yang ada hanyalah putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan

barang-barang tetap maupun tidak tetap yang diperoleh dari atau yang dibeli dari uang hasil korupsi.<sup>68</sup>

Dari data yang terdapat dalam Statistik Kriminal yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, terdapat 5175 kasus yang diputus dengan pidana bersyarat/pidana percobaan dari 72893 kasus yang diputus di seluruh Indonesia. Dari 5175 kasus yang diputus dengan pidana bersyarat/pidana percobaan itu tidak ada yang diputus dengan menetapkan syarat khusus yang berupa perintah memberikan ganti rugi kepada korban.

Dari hasil penelitian tersebut di atas memperlihatkan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana tidak atau kurang memperhatikan nasib korban. Hal ini tidak dapat dikatakan semata-mata karena kurangnya perhatian para hakim dalam memberikan perlindungan kepada korban tetapi juga karena dalam kebijakan legislatif/formulasi yang ada khususnya dalam KUHP dapat dikatakan hampir tidak memberikan perhatian pada perlindungan langsung kepada korban.

Dari hasil wawancara dengan sembilan orang hakim yang ada di tiga pengadilan yang ada di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sebagian besar para hakim (8 orang) bahwa para hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pembayaran ganti rugi kepada korban karena di dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak terdapat jenis pidana berupa membayar ganti rugi kepada korban, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Jika kami (para hakim pen.) menjatuhkan putusan yang berisi perintah untuk

---

<sup>68</sup> Disusun kembali dari Statistik Kriminal, Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta.



membayar ganti rugi pada korban maka kami khawatir akan mendapat perlawanan baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa karena hal itu tidak ada dalam ketentuan KUHP. Satu orang hakim memberikan penjelasan bahwa para pelaku tindak pidana yang ada di daerah ini adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa (miskin) jadi percuma kalau diperintahkan untuk membayar uang ganti rugi. Disamping itu masalah ganti rugi tidak ada ketentuannya dalam KUHP.

... Dalam menjawab pertanyaan mengapa dalam menjatuhkan pidana bersyarat kurang bahkan tidak ada yang disertai dengan syarat khusus para hakim memberikan jawaban : syarat khusus berupa ganti rugi kepada korban akan dikenakan kepada terpidana jika tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku itu adalah yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban (6 orang hakim), disamping itu ada yang mengatakan (2 orang hakim) bahwa syarat khusus dalam pidana bersyarat itu dijatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan oleh terpidana itu merupakan suatu yang dianggap sebagai suatu kesengajaan sehingga untuk membina terpidana melalui pidana bersyarat diperlukan penjatuhan syarat umum dan disertai syarat khusus. Dalam kenyataan selama ini yang dijatuhi pidana bersyarat adalah mereka yang melakukan tindak pidana ringan, tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena kenakalan. Sikap pelaku tindak pidana di depan sidang juga akan menentukan akan dijatuhkannya pidana bersyarat atau pidana lainnya karena untuk menjatuhkan pidana bersyarat memerlukan pengawasan yang terus menerus dari petugas Lembaga Pemasyarakatan guna mengetahui

ditaatinya syarat umum yang ditentukan serta syarat khusus jika hal itu juga diperintahkan oleh hakim (1 orang hakim).

Dari hasil wawancara dengan para hakim yang bertugas di 3 Pengadilan Negeri yang ada di Nusa Tenggara Barat tersebut di atas menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pada korban terutama berkaitan dengan pemberian ganti kepada korban dalam peradilan pidana adalah karena kebijakan legislatif/formulatif yang kurang berorientasi pada korban sehingga dalam praktek, perhatian yang diberikan oleh para hakim dalam menjatuhkan putusan adalah sesuai dengan arah kebijakan legislatif/formulasi yang ada. Jika putusan penjatuhan pidana bersyarat dilihat dari kepentingan pembinaan pelaku tindak pidana maka hal itu telah sesuai dengan kebijakan legislatif/formulasi yang ada (dalam KUHP), karena para hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Ketentuan yang ada dalam KUHP hanya memberikan sedikit peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana berupa perintah membayar ganti rugi kepada korban yaitu jika akan dijatuhkan pidana bersyarat serta jika syarat khusus berupa membayar ganti kerugian itu dianggap perlu oleh hakim. Dalam prakteknya para hakim menganggap tidak perlu menjatuhkan pidana bersyarat yang disertai dengan syarat khusus apakah itu membayar ganti rugi kepada korban atau syarat khusus lainnya guna mencegah timbulnya korban lebih lanjut. Selain dari itu jarang

penjatuhannya pidana yang disertai dengan perintah membayar ganti rugi kepada korban menurut Barda Nawawi Arief antara lain<sup>69</sup>:

- a. penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok; ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
- b. penetapan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
- c. syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Meskipun dalam proses peradilan pidana sangat jarang diputuskan oleh para hakim agar pelaku tindak pidana/terpidana membayar ganti kerugian kepada korban atau perintah memperbaiki kerusakan akibat dari tindak pidana, tetapi praktek yang terjadi diluar sidang, terutama antara pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya luka-luka dan kerusakan harta benda korbannya, sering terjadi pelaku pelanggaran lalu lintas membayar sejumlah uang kepada korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban kecelakaan lalu lintas di kota Mataram, diperoleh keterangan bahwa para pelaku atau keluarganya datang dengan sukarela kepada korban atau keluarganya untuk memberikan

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief; Ibid, hal. 57.

sejumlah uang kepada korban. Pemberian uang seperti ini meskipun tidak dikatakan sebagai ganti rugi, tetapi menggunakan istilah yang bermacam-macam misalnya; uang duka jika korbannya meninggal dunia, uang untuk mengganti barang yang rusak, sumbangan sebagai rasa tanggung jawab, uang perawatan/pengobatan dan ada juga yang menyebutnya sebagai wujud permintaan maaf karena telah melakukan kekeliruan.

Dalam proses pembayaran/pemberian uang kepada korban di luar proses peradilan pidana ini diperoleh keterangan baik dari korban maupun dari pelaku tindak pidana bahwa pemberian uang ini ada yang dilakukan atas inisiatif pelaku tindak pidana, ada yang dilakukan atas inisiatif petugas polisi lalu lintas, dan ada juga atas inisiatif dari keluarga korban dengan tujuan untuk menghentikan proses pidana secara damai.

Khusus untuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan timbulnya luka-luka, pelaku tindak pidana bersedia dengan sukarela membayar sejumlah uang kepada korban karena mereka (pelaku) tidak ingin terjadi korban atau keluarganya melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Alasan lain yang dikemukakan adalah karena petugas polisinya menyarankan untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk memperbaiki segala yang rusak akibat dari tindak pidana.

Satu hal yang jelas dalam hal menentukan besarnya uang yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban ini ditentukan dengan jalan musyawarah antara pelaku dengan korban bahkan lebih banyak diketahui dan

disetujui oleh petugas polisi sehingga tidak ada unsur paksaan atau pemerasan kepada pelaku tindak pidana.

Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang tergolong tidak mampu biasanya mereka menyerahkan urusannya kepada polisi lalu lintas untuk memproses secara hukum. Untuk korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas, pemberian uang kepada keluarga korban tetap dilakukan oleh pelaku maupun keluarganya meskipun mereka tahu bahwa pemberian uang semacam ini tidak akan menghentikan penuntutan atas si pelakunya.

Praktek yang terjadi seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan adanya perubahan pandangan masyarakat dan aparat penegak hukum (polisi) terhadap berfungsinya hukum dalam masyarakat. Perubahan pandangan yang dimaksud adalah bahwa tidak semua tindak pidana yang terjadi harus diselesaikan melalui jalur hukum (pidana) melainkan dapat juga diselesaikan melalui jalur musyawarah, meskipun hal semacam ini masih dapat dianggap bertentangan dengan hukum.

Berkaitan dengan perubahan pandangan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan:<sup>70</sup> Pembicaraan kita mengenai pola-pola penyelenggaraan hukum oleh badan-badan yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum (*enforcement agencies*) telah memperlihatkan terjadinya kelainan atau penyimpangan-penyimpangan antara hal-hal yang tertera di dalam ketentuan-ketentuan hukum, yang

---

<sup>70</sup> Satjipto Rahardjo; *Hukum dan Masyarakat*, (cet. ke 4), Angkasa, Bandung, 1980, hal. 76.

memberi batasan atau uraian tentang tugas pekerjaan badan-badan tersebut dengan praktek-praktek yang dijalankan oleh badan-badan tersebut sehari-harinya. Dalam kesempatan lain diakutannya, keadaan yang demikian ini memberi isyarat, bahwa rakyat lebih mempercayakan penyelesaian sangketanya kepada institusi atau badan-badan di luar pengadilan yang resmi itu.<sup>71</sup>

Kondisi korban dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas seperti yang dikemukakan di atas lebih baik jika dibandingkan dengan korban-korban dari kejahatan lainnya. Dalam kasus pencurian sepeda motor, korban yang kehilangan sepeda motor, seringkali menjadi korban lebih lanjut jika para korban ini melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Dari 10 orang korban yang kehilangan sepeda motor di kota Mataram, 7 orang yang memberikan laporan kehilangan sepeda motornya kepada kepolisian pernah dimintai biaya untuk mencari pelaku pencurian. 3 orang korban yang kehilangan sepeda motornya tidak melaporkan peristiwanya ke kepolisian dengan alasan yang berbeda. 2 orang korban tidak melapor karena berusaha mencari sendiri dan tidak ada gunanya melapor karena hanya sedikit orang yang kehilangan itu ditemukan kembali, sementara korban dimintai biaya untuk pencarian pelakunya. Sementara itu 1 orang lagi terpaksa menebus sepeda motornya dari pelaku dengan membayar tebusan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena diancam oleh pelakunya jika melapor pada petugas kepolisian. Dalam kondisi seperti itu korban dengan terpaksa

<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo; *Ilmu Huku* (cet. ke 5), P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 153.

membayar uang tebusan sepeda motornya karena tidak punya pilihan lain lagi dari pada kehilangan sepeda motornya.

Dengan melihat kenyataan seperti yang dikemukakan di atas, ternyata bahwa orang-orang yang menjadi korban kejahatan selain tidak mendapat perhatian dalam proses peradilan pidana juga tidak mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana. Keengganan dari para korban untuk melaporkan kejahatan yang menimpa mereka serta adanya pungutan yang harus mereka hadapi jika melapor tentang kejahatan yang terjadi merupakan bukti kurangnya perhatian dan perlindungan yang diberikan kepada para korban.

Sesuai dengan perkembangan yang terjadi sekarang, seharusnya dalam proses penegakan hukum maupun dalam proses peradilan pidana perhatian aparat penegak hukum tidak hanya harus diberikan kepada upaya penanggulangan kejahatan yang berorientasi pada pelaku dan pada upaya perlindungan masyarakat tetapi juga harus memberikan perhatian yang sama pada mereka-mereka yang menjadi korban.

Memang harus diakui bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang belum bisa mendukung upaya memberikan perhatian pada korban karena jenis sanksi yang ada dalam KUHP tidak ada yang secara langsung dapat memberikan perlindungan kepada korban. Ketiadaan jenis pidana yang memberikan perlindungan pada korban khususnya yang menyangkut pemberian ganti rugi pada korban menyebabkan para hakim tidak dapat menjatuhkan putusan untuk memberikan perlindungan pada korban khususnya yang menyangkut perintah pemberian ganti rugi.

Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang tidak tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ada karena hal ini akan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP ini merupakan landasan sekaligus menjadi asas yang tidak dapat ditinggalkan oleh para hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Asas ini dalam hukum pidana dikenal dengan asas Legalitas yang biasanya menurut Moeljatno, mengandung tiga pengertian, yaitu:

- (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. (kiyas)
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>72</sup>

Pengertian yang terkandung dalam asas legalitas sebagaimana disebutkan di atas maka yang harus ada dalam aturan hukum pidana itu mencakup perbuatan yang dilarang/yang diharuskan dan jenis pidana yang diancamkan dalam larangan, keharusan tersebut. Dengan demikian jika seorang hakim dalam memutus suatu perkara mendasarkan putusannya pada sesuatu yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, maka hal itu bertentangan dengan atau

<sup>72</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 25.



melanggar asas legalitas yang diakui secara universal. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menulis:<sup>73</sup> Kenyataan mengenai tertinggalnya hukum di belakang masalah yang diaturnya sering dikatakan sebagai ciri hukum yang khas. Tetapi ketinggalan ini akan betul-betul menimbulkan suatu persoalan pada saat jarak yang memisahkan antara peraturan formal dengan kenyataan yang terjadi telah melampaui batas-batas yang wajar.

Kembali ke masalah pemberian ganti rugi kepada korban dalam penerapan hukum pidana, kemungkinan pemberian ganti rugi melalui penjatuhan pidana bersyarat merupakan suatu kemungkinan yang agak sulit untuk dilaksanakan oleh para hakim karena disamping harus mempertimbangkan manfaat dari penjatuhan pidana bersyarat jika dilihat dari sudut kepentingan pembinaan pelaku dan kepentingan masyarakat juga harus mempertimbangkan perlu atau tidaknya dijatuhkan syarat-syarat khusus jika pidana bersyarat dijatuhkan.

Pertimbangan perlu atau tidaknya dijatuhkan pidana bersyarat akan ditentukan oleh cara pandang dari para hakim terhadap tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana. Jika para hakim tidak mempunyai pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan hakekat dari penjatuhan pidana, maka akan sulit diharapkan dari seorang hakim untuk lebih banyak mempertimbangkan kemungkinan untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Seorang hakim yang tidak mempunyai pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan hakekat dari penjatuhan pidana, maka yang ada dalam pikiran

---

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo; Ibid, hal. 99-100.

hakim adalah jika seorang pelaku telah dihadapkan di depan sidang pengadilan dan dinyatakan bersalah, maka hukuman yang pantas adalah pidana penjara meskipun hanya untuk jangka waktu yang pendek dan meskipun pelaku tindak pidana mungkin sudah cukup jika dijatuhi dengan pidana bersyarat atau dengan pidana denda saja.

Kurangnya perhatian terhadap korban dalam proses peradilan pidana seperti yang dikemukakan di atas, dinyatakan pula oleh Andi Mattalatta dengan mengatakan : kesan keterasingan korban dalam peradilan pidana juga terasa. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kurangnya pembahasan-pembahasan mengenai korban di dalam proses pidana.<sup>74</sup>

Sementara itu Reiff juga mengatakan : *The problem of crime, always gets reduced to "what can be done about criminal." Nobody asks, "what can be done about victims?" everyone assumes the best way to help the victim is to catch the criminals-as though the offender is the only source of the victim's trouble.*<sup>75</sup>

Dengan melihat pendapat tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan korban dengan jalan pemberian ganti rugi kepada korban dalam penerapan hukum pidana masih belum mendapat perhatian serius dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

<sup>74</sup> Andi Mattalatta dalam Sahetapy ed; *Viktimology Sebuah Bunga Rampai*, Op.Cit. hal 40.

<sup>75</sup> Andi Mattalatta : Ibid 39-40.

### C. Prospek Pengaturan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Indonesia

Perhatian terhadap kepentingan korban untuk memperoleh ganti kerugian dalam hukum pidana Indonesia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1946 yang menyatakan berlakunya KUHP dan dengan berlakunya Undang-undang No. 73 tahun 1958 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemungkinan bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi dalam perkara pidana yaitu dengan adanya pengaturan tentang pidana bersyarat yang salah satu syarat khususnya adalah pembayaran ganti rugi kepada korban. Namun demikian pengaturan pemberian ganti rugi dalam KUHP masih bersifat terbatas.

Selanjutnya perhatian terhadap kepentingan korban untuk mendapatkan ganti rugi terus berkembang dengan diaturnya pemberian ganti rugi kepada korban dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di luar KUHP. Perkembangan perhatian pada korban kejahatan ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan yang terjadi di tingkat internasional baik melalui pembahasan secara ilmiah berkaitan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan baru tentang korban (victimologi) maupun pembahasan dalam deklarasi-deklarasi PBB.<sup>76</sup>

Hanya saja pengaturan pemberian ganti rugi atau memperbaiki kerusakan akibat dari tindak pidana pada korban dalam peraturan perundang-

<sup>76</sup> Antara lain *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 1985.

undangan di luar KUHP sekarang ini sebagian besar mengatur perlindungan korban yang bersifat kolektif (masyarakat atau negara), belum banyak mengatur perlindungan korban individual.

Sejak tahun 1970 yaitu dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 (Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) mulai terlihat adanya pengaturan tentang ganti rugi pada korban yaitu kepada korban yang ditimbulkan oleh kesalahan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana. Pasal 9 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 memberikan hak kepada tersangka/terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasar atas hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan untuk memperoleh ganti rugi.

Ketentuan pasal 9 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 memperlihatkan adanya keinginan untuk memberikan perlindungan kepada korban (dari tindakan aparat penegak hukum) sekaligus memperlihatkan negara telah mulai turun tangan untuk memberikan ganti rugi pada korban. Dari sini mulai terlihat bahwa negara bertanggung jawab untuk menghilangkan atau menanggulangi penderitaan warganya yang menjadi korban dalam proses peradilan pidana, baik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maupun yang dilakukan oleh aparat negara dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam Undang-undang

No. 8 tahun 1981 (KUHP) telah diatur pula hak tersangka/terdakwa dan korban tindak pidana lainnya untuk menuntut ganti rugi/rehabilitasi melalui/dalam proses peradilan pidana.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada memperlihatkan bahwa pengaturan perlindungan korban khususnya yang berwujud ganti rugi tidak memiliki pola yang sama. Hal ini dapat dimengerti karena masing-masing peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan pola perumusan yang berbeda baik yang menyangkut ganti rugi sebagai salah satu jenis pidana atau sebagai tindakan maupun dalam menggunakan istilah ganti rugi kepada korban.

Ganti rugi sebagai salah satu pidana atau tindakan, ada yang menempatkannya sebagai pidana tambahan, misalnya dalam pasal 63 UU No. 8 tahun 1999 (Perlindungan Konsumen), pasal 18 ayat (1) sub b UU No. 31 tahun 1999 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Ada pula yang menempatkan sebagai tindakan tata tertib seperti yang terdapat dalam pasal 8 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 (Tindak Pidana Ekonomi). Dalam KUHP, ganti rugi tidak dikategorikan sebagai pidana tambahan atau tindakan tata tertib melainkan dijadikan hak tersangka/terdakwa dan korban yang dengan pemberian hak semacam ini maka ganti rugi yang dimaksud dalam KUHP adalah ganti rugi dalam pengertian perdata dalam arti bahwa hak untuk menuntut ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada tersangka/terdakwa atau korban tindak pidana lainnya dan tidak ditentukan oleh hakim pidana.

Dari segi istilah, perlindungan korban diwujudkan dalam beberapa istilah, dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi digunakan istilah pembayaran uang pengganti, dalam undang-undang tindak pidana ekonomi digunakan istilah “memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dalam undang-undang perlindungan konsumen digunakan istilah ganti rugi dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 2000 digunakan istilah ganti rugi kepada korban.

Adanya keanekaragaman baik dalam menentukan sifat ganti rugi sebagai pidana atau tindakan maupun dalam menggunakan istilah menunjukkan adanya perbedaan pandangan dari pembuat kebijakan hukum pidana tentang bagaimana seharusnya perlindungan korban harus diberikan.

Selain itu tidak adanya pengaturan ganti rugi dalam Buku I KUHP yang berlaku sekarang menyebabkan keinginan untuk memberikan perlindungan pada korban diwujudkan dalam berbagai istilah dan bentuk kebijakan. Tetapi jika masalah perlindungan korban telah ada pengaturannya dalam Buku I KUHP maka akan terdapat keseragaman kebijakan dalam memberikan perlindungan pada korban karena Buku I KUHP juga berlaku terhadap ketentuan-ketentuan lain di luar KUHP sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang bersangkutan.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian ganti rugi sebagai pidana/tindakan maupun sebagai hak yang dapat dituntut oleh korban, dapat dilihat bahwa ganti rugi kepada korban dapat dibedakan kedalam beberapa bentuk yaitu:

1. ganti rugi sebagai salah satu jenis sanksi pidana yaitu sebagai pidana tambahan atau sebagai salah satu syarat untuk pidana bersyarat;
2. ganti rugi sebagai salah tindakan administratif yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana yang diputus melalui proses pidana;
3. ganti rugi sebagai hak keperdataan yang diberikan oleh hukum pidana yang dapat dituntut oleh korban melalui lembaga praperadilan atau melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana.

Sementara itu, Barda Nawawi Arief mengemukakan adanya empat kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara pidana, yaitu:

- a. pemberian ganti rugi sebagai "syarat khusus" dalam pidana bersyarat (KUHP);
- b. memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai "tindakan tata tertib (Undang-Undang No. 7 Drt. 1955);
- c. pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (Undang-Undang No. 3/1971);
- d. penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHP).<sup>77</sup>

Sementara itu, dengan tidak memisahkan secara tegas antara restitusi dengan kompensasi, Stephen Schafer mengemukakan adanya lima sistem pemberian restitusi atau kompensasi untuk korban tindak pidana.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, Ibid. Hal 59.

<sup>78</sup> Stephen Schafer, *The Victim And His Criminal, a study in functional responsibility*, Northeastern University, Random House, 1968, hal. 105-108.

1. *Damages, civil in character and awarded in civil proceedings.* (ganti rugi yang bersifat keperdataan dan diberikan melalui proses perdata);
2. *Compensation, civil in character but awarded in criminal proceeding.* (kompensasi yang bersifat keperdataan tetapi diberikan melalui proses pidana);
3. *Restitution, civil in character but intermingled with penal characteristics and awarded in criminal proceedings* (restitusi yang bersifat keperdataan tetapi bercampur dengan sifat pidana dan diberikan melalui proses pidana);
4. *Compensation, civil in character, awarded in criminal proceedings and backed by the resources of the state* (kompensasi bersifat keperdataan yang diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh anggaran/dana dari negara)
5. *Compensation, neutral in character and awarded through a special procedure* (kompensasi yang bersifat netral dan diberikan melalui prosedur khusus)

Pengaturan pemberian ganti rugi pada korban dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya masih belum dapat dikatakan berorientasi pada korban (*victim oriented*), melainkan masih berorientasi sepenuhnya pada pelaku (*offender oriented*), oleh sebab itu dalam penerapan hukum pidana, masalah perlindungan pada korban khususnya yang menyangkut pemberian ganti rugi pada korban sangat sulit untuk diwujudkan.



Beberapa kelemahan pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana positif saat ini antara lain:

1. Tidak adanya sanksi pidana yang berupa ganti rugi dalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan atau tindakan yang dapat dijadikan landasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana ganti rugi. Pasal 14 c ayat (1) KUHP hanya menentukan ganti rugi sebagai salah satu syarat khusus yang dapat ditetapkan oleh hakim jika menjatuhkan pidana bersyarat artinya jika hakim tidak menjatuhkan pidana bersyarat, maka tidak ada kemungkinan bagi korban untuk memperoleh ganti rugi. Walaupun hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim tidak diharuskan untuk menjatuhkan syarat khusus berupa pembayaran ganti rugi kepada korban. Dalam kenyataannya para hakim sangat jarang menetapkan syarat khusus berupa pembayaran ganti rugi pada saat menjatuhkan pidana bersyarat.
2. Kejadian-kejadian konkret yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa tindak pidana yang selalu menimbulkan kerugian bagi korban adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP sedangkan pengaturan pemberian ganti rugi kepada korban dalam kebijakan legislatif/formulasi lebih banyak diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini menyebabkan kebijakan aplikasi/yudikatif dapat dikatakan tidak pernah diputuskan pemberian ganti rugi pada korban.
3. Karena ketentuan yang mengatur pembayaran ganti rugi pada korban dalam hukum pidana positif berada dalam ketentuan-ketentuan pidana khusus

yang ada di luar KUHP, maka ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat berlaku untuk semua tindak pidana dan pidana pembayaran ganti rugi hanya berlaku untuk korban yang terjadi dari pelanggaran terhadap tindak pidana khusus tersebut.

Menyadari adanya kekurangan dalam mengatur kepentingan korban dalam KUHP yang berlaku sekarang serta kurangnya perlindungan korban dalam penerapan hukum pidana, maka dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional tahun 2000, masalah perlindungan pada korban khususnya yang menyangkut pembayaran ganti rugi pada korban mulai mendapat perhatian yang agak seimbang dengan perhatian yang diberikan kepada pelaku dan perlindungan pada masyarakat.

Adanya perhatian terhadap kepentingan korban dalam Konsep Rancangan KUHP terlihat dalam rumusan pasal 62 yang menentukan salah satu dari pidana tambahan adalah pembayaran ganti kerugian disamping pidana pemenuhan kewajiban adat yang dapat dikatakan juga sebagai upaya perlindungan terhadap korban (kolektif). Disamping itu dalam pedoman penjatuan pidana ditentukan agar hakim dalam menjatuhkan pidana, mempertimbangkan antara lain pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya (pasal 51 ayat (1) sub I, serta dalam pasal 66 ditentukan bahwa pidana penjara dapat tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan yang salah satu keadaan tersebut adalah terdakwa telah membayar ganti kerugian pada korban.

Meskipun dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 2000 telah dicoba untuk memberikan perhatian pada korban dengan jalan memberikan kemungkinan untuk memberikan ganti rugi, namun dalam kebijakan formulasi masih tetap terlihat lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Dapat dikatakan demikian karena tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Konsep KUHP pada prinsipnya diarahkan pada kepentingan pelaku. Kalaupun tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP masih tertuang tujuan melindungi kepentingan korban tapi bukan korban individual melainkan kepentingan korban kolektif dan perlindungan korban secara abstrak.

Bahwa Konsep KUHP masih lebih berorientasi pada pelaku terlihat juga dalam penjelasan pasal 50 Konsep KUHP yang menyatakan: "Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan".

Memang harus diakui bahwa dengan dicantumkannya ganti rugi sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Buku I Konsep KUHP dan dengan demikian dapat berlaku umum untuk semua delik baik yang diatur dalam (Konsep) KUHP maupun delik-delik yang tersebar di luar KUHP. Tetapi khusus untuk delik-delik yang terdapat dalam (Konsep) KUHP, pidana

tambahan tidak dapat dijatuhkan untuk semua delik karena telah dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam pasal 62 ayat (2) Konsep KUHP yang menyatakan “ Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana”.

Ketentuan seperti ini telah membatasi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan khususnya ganti rugi pada semua delik, karena hanya delik tertentu saja yang dapat dijatuhi pidana tambahan yaitu di dalam rumusan delik tersebut secara tegas diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana tambahan.

Pembatasan ini juga berlaku untuk delik-delik di luar (Konsep) KUHP, karena pasal 62 ini berada dalam Bab III Buku I, yang oleh pasal 192 dinyatakan berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain.

Dengan adanya ketentuan pasal 62 ayat (2) tersebut, maka hanya delik-delik tertentu saja yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, karena dalam rumusan delik telah secara tegas dicantumkan pidana tambahan apa yang dapat dijatuhkan oleh hakim jika hendak menjatuhkan pidana tambahan.

Delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi adalah yang terdapat dalam:

1. Bab XIV tentang tindak pidana terhadap asal usul dan perkawinan;
2. Bab XXIV tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman;
3. Bab XXVII tentang tindak pidana merugikan kreditur dan orang yang berutang;

#### 4. Bab XXIX tentang kejahatan jabatan.

Selain dari ketentuan tersebut tidak ada lagi delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban, tetapi untuk jenis pidana tambahan lainnya masih dimungkinkan karena dalam rumusan delik diperbolehkan, misalnya pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan barang-barang tertentu.

Melihat tempat dimana pidana tambahan berupa pembayaran ganti dapat dijatuhkan oleh hakim, maka kita akan berpendapat bahwa Konsep KUHP hanya akan memberikan kemungkinan pembayaran ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian materi yang secara langsung disebabkan karena tindak pidana. Konsep KUHP tidak memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana terhadap badan misalnya dalam penculikan dan penyanderaan, ada kerugian seorang karena tidak dapat mencari nafkah; dalam tindak pidana penganiayaan ada kerugian karena harus mengeluarkan biaya pengobatan dan juga kehilangan penghasilan karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena dianiaya.

Dengan adanya pembatasan seperti yang dirumuskan dalam pasal 62 ayat (2) Konsep KUHP, maka seperti ada diskriminasi terhadap siapa yang berhak untuk mendapat ganti rugi akibat dari suatu tindak pidana dan siapa yang tidak akan dapat memperoleh ganti rugi. Orang-orang yang menderita fisik karena penganiayaan atau karena percobaan pembunuhan atau mereka yang menderita karena penculikan atau penyanderaan yang menyebabkan mereka tidak dapat mencari nafkah sebagai akibat dari suatu tindak pidana

yang justru termasuk kategori korban yang tidak mendapat kemungkinan untuk memperoleh ganti rugi karena dalam rumusan delik-delik kejahatan terhadap tubuh tidak tercantum ketentuan yang membolehkan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemberian ganti rugi pada korban. Jika hal ini dikaitkan dengan perkembangan kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini yang menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan (penganiayaan) dan kejahatan dengan menggunakan kekerasan (perampokan, pencurian yang disertai dengan kekerasan) sering terjadi dalam masyarakat dan ini berarti bahwa korban dari kejahatan ini terus bertambah, maka jika Konsep KUHP masih menggunakan pola perumusan pidana tambahan seperti yang ada sekarang, maka korban dari kejahatan kekerasan akan tetap tidak mendapat perhatian dan perlindungan dari hukum pidana.

Di dalam masyarakat, sering terjadi seorang yang melakukan tindak pidana yang berbentuk kealpaan/ kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian, memberikan ganti rugi pada korbannya. Hal seperti ini oleh Konsep KUHP diangkat sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa (pasal 66 sub d) dan sebagai salah satu alasan yang dapat meringankan pidana (pasal 124 sub e). Ketentuan seperti ini bukanlah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pemberian ganti rugi melainkan agar hakim mempertimbangkan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk korbannya bilamana akan menjatuhkan putusan pidana. Dengan demikian

ganti rugi semacam ini bukanlah diorientasikan untuk kepentingan korban melainkan diorientasikan untuk kepentingan pelaku.

Karena masih adanya beberapa kelemahan yang menyangkut pengaturan ganti rugi dalam Konsep KUHP, maka sebelum Konsep KUHP ini disahkan menjadi hukum positif, masalah perlindungan pada korban perlu mendapat perhatian yang serius karena perlindungan pada korban bukan saja menjadi perhatian dan kepentingan nasional melainkan juga telah mendapat perhatian masyarakat internasional. Hal ini terlihat dalam Kongres PBB ke-X tanggal 10-17 April tahun 2000 di Viena yang telah menghasilkan suatu deklarasi yang isinya antara meminta perhatian negara-negara anggota untuk memberikan perhatian pada masalah yang berhubungan perlindungan korban.

Dalam poin 27 dan Deklarasi Viena dinyatakan:

*We decide to introduce, where appropriate, national and international action plans in support of victims of crime, such as mechanisms for mediation and restorative justice, and we establish 2002 as a target date for states to review their relevant practices, to develop further victim support services and awareness campaigns on the rights of victims and to consider the establishment of funds for victims, in addition to developing and implementing witness protection policies.* (Kami memutuskan untuk memperkenalkan secara memadai, rencana tindakan nasional, regional, dan internasional dalam memberikan dukungan kepada korban kejahatan, seperti mekanisme untuk mediasi dan keadilan restoratif, dan kami menetapkan tahun 2002 sebagai tahun target untuk negara-negara anggota untuk meninjau

kembali praktek mereka yang relevan, untuk mengembangkan jasa dukungan pada korban dan kampanye kesadaran tentang hak-hak korban dan untuk mempertimbangkan pembentukan dana untuk korban, selain pengembangan dan implementasi kebijakan perlindungan saksi).

Dalam poin 28 dinyatakan :

*We encourage the development of restorative justice policies, procedures and programmes that are respectful of the rights, needs and interests of victims, offenders, communities and all other parties.*<sup>79</sup>

(Kami mendorong perkembangan kebijakan restoratif, prosedur dan program yang menghormati hak-hak kebutuhan dan kepentingan korban, pelanggar komunitas dan pihak-pihak lainnya).

Adanya perhatian dari masyarakat internasional yang tertuang dalam hasil Kongres PBB ke-X di Viena tersebut di atas merupakan pencerminan dari keprihatinan terhadap keadaan korban yang tidak mendapat perhatian dalam proses peradilan pidana selama ini.

Oleh sebab itulah melindungi kepentingan korban khususnya yang menyangkut pemberian ganti rugi dalam proses peradilan pidana di negara kita, dan untuk merespon himbauan dalam Deklarasi Viena sebagaimana dikemukakan di atas, maka beberapa hal yang menyangkut pemberian ganti rugi pada korban yang diatur dalam Konsep KUHP tahun 2000 perlu dikaji kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

<sup>79</sup> Kumpulan Bahan, *Tenth United Nation Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, Viena, 10-17 April 2000.



1. Pasal 62 ayat (2) Konsep KUHP perlu di tinjau kembali karena keberadaan pasal tersebut telah membatasi ruang gerak bagi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa ganti rugi bagi korban. Sekiranya kebijakan legislatif/formulasi yang tertuang dalam Konsep KUHP diorientasikan juga kepada korban, maka seyogyanya masalah ganti rugi diintegrasikan dalam pasal 62 ayat (3) sekarang sehingga berbunyi "Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi atau ganti rugi kepada korban (tambahan dari Penulis) dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana". Pasal 62 ayat (3) yang ada dalam Konsep KUHP sekarang ini tidak memasukan ganti rugi bagi korban sebagai salah satu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan walaupun tidak dirumuskan dalam perumusan tindak pidana. Dengan perumusan seperti yang disarankan di atas, maka masalah ganti rugi bagi korban akan tetap dapat dijatuhkan oleh hakim meskipun tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana.
2. Untuk tindak pidana yang membawa kerugian bagi korban baik kerugian yang berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan maupun kerugian akibat tidak dapat menjalankan pekerjaan dalam mencari nafkah, hendaknya ganti rugi dapat dirumuskan dalam tindak pidana secara alternatif kumulatif dengan pidana pokok. Adanya ganti rugi dalam perumusan tindak pidana yang pidananya dirumuskan secara alternatif kumulatif maka hakim akan dapat mempertimbangkan pemberian ganti rugi bagi korban bersama dengan atau tanpa pidana pokok lainnya,

sepanjang hakim memandang bahwa dalam kenyataannya pelaku termasuk golongan orang yang mampu memberikan ganti rugi kepada korban dan korban sangat membutuhkannya.

Dalam Konsep KUHP yang ada sekarang (tahun 2000) tidak terlihat adanya kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi kepada korban sementara disisi lain negara memperoleh pemasukan dari adanya pidana denda. Oleh karena itu harus dipikirkan kemungkinan negara memberikan ganti rugi pada korban melalui atau dengan cara dana sebagian atau seluruhnya dari pidana denda yang diperoleh diserahkan kepada korban atau dari tiap-tiap denda yang dijatuhkan sebagiannya disimpan untuk dipergunakan sebagai persediaan dana ganti rugi kepada korban atau seperti yang ada di negara-negara lain, dimana korban betul-betul membutuhkan ganti rugi sedangkan pelaku termasuk golongan orang yang tidak mampu, maka negara melalui lembaga/badan yang khusus untuk itu menyediakan dana kompensasi bagi korban. Adanya kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi (perlindungan) pada korban karena; negara sebagai pengayom kepentingan masyarakat secara keseluruhan memiliki kewajiban untuk seoptimal mungkin meningkatkan kesejahteraan warganya. Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran, bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagal nya negara dalam

memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.<sup>80</sup> Dalam konteks masalah santunan terhadap korban tindak pidana, maka negara merupakan perpanjangan tangan kepentingan dari pihak korban di dalam menghadapi tertuduh atau pelaku tindak pidana.<sup>81</sup> Sementara itu Muladi mengatakan ada dua alasan mengapa negara harus ikut bertanggung jawab terhadap penderitaan/kerugian korban yaitu :

1. Berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*); bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut.
2. Berdasarkan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*); bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Andi Mattalatta, Op. Cit. Hal 37.

<sup>81</sup> Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1991-1992, hal. 24.

<sup>82</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit hal. 78.

Sementara itu, Arif Gosita<sup>83</sup> menyebutkan alasan-alasan utama ganti kerugian (kompensasi) kepada korban oleh negara antara lain adalah:

1. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
2. Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban;
3. Ketidaklayakan pembagian hasil;
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab negara dalam memberikan ganti rugi (kompensasi) pada korban tampak juga dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang dihasilkan oleh sidang umum PBB tanggal 15 Desember 1985, yang antara lain dalam pon 12 menyatakan:

*When compensation is not fully available from the offender or other sources, states should endeavour to provide financial compensation to:*

- (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes;*
- (b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization.<sup>84</sup>*

Dengan demikian negara memang harus ikut bertanggung jawab terhadap penderitaan para korban karena negara harus mensejahterakan warganegaranya dan negara juga yang mempunyai tanggung jawab untuk

<sup>83</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Ind-Hill-Co, cet. I Jakarta, 1987, hal. 25.

<sup>84</sup> United Nation, *A Compilation of International Instruments*, Volume I, New York, 1993, hal. 384.

menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika terjadi suatu tindak pidana yang membawa kerugian dan penderitaan dari salah seorang anggota warga masyarakat maka itu dapat dikatakan terjadi karena kesalahan atau ketidakmampuan aparat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya.

Tanggung jawab negara untuk memberikan ganti rugi terhadap korban untuk saat sekarang mungkin akan menemui kesulitan karena terbatasnya kemampuan keuangan negara, tetapi hal seperti ini pernah terjadi juga ketika memikirkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dimana pada saat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku, orang juga berpikir bahwa negara tidak mampu menyediakan dana untuk itu, namun dalam kenyataannya negara mampu menyediakan dana untuk membayar penasehat hukum untuk tersangka atau terdakwa yang tidak mampu menyediakan penasehat hukumnya sendiri.

Jika untuk tersangka atau terdakwa negara mampu menyediakan dana untuk membayar seorang penasehat hukum, maka negara juga akan mampu menyediakan dana untuk korban yang betul-betul mengalami penderitaan akibat dari ketidakmampuan negara menjaga keamanan dan keselamatan warganegaranya.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam rangka pengaturan ganti rugi bagi korban baik dalam kebijakan legislatif/formulasi maupun dalam kebijakan yudikatif/aplikatif adalah mengenai tingkat keterlibatan atau

kesalahan korban dalam suatu tindak pidana. Mengenai keterlibatan atau tingkat kesalahan korban dalam suatu tindak pidana ini perlu dikaji oleh karena tiap-tiap korban mempunyai peranan yang berbeda-beda pada suatu tindak pidana dan hal ini akan membawa pengaruh terhadap seberapa perlunya memberikan ganti rugi pada seorang korban.

Dengan melihat tingkat keterlibatan korban dalam suatu tindak pidana, Ezzat Abdel Fattah<sup>85</sup> mengemukakan beberapa tipologi korban sebagai berikut:

1. "*nonparticipating victims*" adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan;
2. "*latent or predisposed victims*" adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu;
3. "*provocative victims*" adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau yang merangsang timbulnya kejahatan;
4. "*participating victims*" adalah mereka yang tidak peduli atau perilaku lain yang memudahkan dirinya sendiri menjadi korban;
5. "*false victims*" adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sementara itu Stephen Schafer membagi tipologi korban berdasarkan tanggung jawabnya sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Ezzat Abdel Fattah, dalam Made Darma Weda, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 205

1. "*unrelated victims*" adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini tanggung jawab penuh terletak pada penjahat;
2. "*provocative victims*" adalah mereka yang merangsang untuk terjadinya kejahatan. Dalam hal ini tanggung jawab ada pada diri korban dan pelaku;
3. "*participating victims*", adalah mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap pelaku tetapi mereka mendorong untuk terjadinya kejahatan pada dirinya sendiri. Dalam hal ini tanggung jawab ada pada korban;
4. "*biologically weak victims*" adalah mereka yang berdasar bentuk fisik tertentu cenderung untuk menjadi korban kejahatan. Dalam hal ini tanggung jawab terletak pada masyarakat atau pemerintah;
5. "*socially weak victims*" adalah mereka yang karena keadaan tertentu berada dalam posisi yang lemah dalam masyarakat sehingga cenderung untuk menjadi korban. Dalam hal seperti ini tanggung jawab ada pada pelaku dan masyarakat;
6. "*self-victimizing victims*" adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Dalam hal ini tanggung jawab berada di pihak korban yang sekaligus bertindak sebagai pelaku;
7. "*political victims*" adalah mereka yang menjadi korban karena lawan politiknya.

Dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid 205-206.

Sedangkan Mendelsohn menyusun tipologo korban sebagai berikut:

1. *The "completely innocent victim" or "ideal victim"*
2. *The "victim with minor guilt" and "the victim due to his ignorance".*
3. *The "victim as guilty as the offender" and the "voluntary victim"*
4. *The "victim more guilty than the offender": -the "provoker victim", the "imprudent victim"*
5. *The "most guilty victim" and the "victim who is guilty alone".*
6. *The "simulating victim" and the "imaginary victim".*<sup>87</sup>

Tipologi lain dari korban adalah yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang sebagai berikut:

1. *"primary victimization"* yaitu korban dalam bentuk perorangan;
2. *"secondary victimization"* yaitu korban dalam bentuk kelompok;
3. *Tertiary victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
4. *"mutual victimization"* yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri;
5. *"no victimization"* Dalam hal ini korbannya tidak dapat segera diketahui.<sup>88</sup>

Paul Zvonimir Separovic menyebutkan jenis-jenis korban terdiri dari korban individual, kolektif, abstrak dan korban pada diri sendiri. Korban kolektif misalnya korban kelompok sosial, korban suku bangsa, korban dari suatu keyakinan, korban rasial, korban golongan minoritas dan lain-lain. Korban abstrak misalnya korban dari pelanggaran terhadap ketertiban umum, seperti mengendarai motor dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol.

<sup>87</sup> Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Op.Cit. Hal. 11.

<sup>88</sup> Made Darma Weda, Op.cit hal. 207.



Korban pada diri sendiri misalnya adalah homoseksual, pemadat narkotik dan lain-lain.<sup>89</sup>

Dengan melihat tipologi korban seperti yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang menjadi korban kejahatan dapat diberi ganti rugi baik dari pelaku, masyarakat atau dari pemerintah. Selain itu dengan melihat tipologi korban maka akan dapat diketahui korban dalam tipologi yang bagaimana yang betul-betul membutuhkan dan dianggap layak untuk menerima perlindungan yaitu dengan memberikan ganti rugi kepadanya dan korban yang dengan tipologi yang bagaimana yang tidak perlu mendapat ganti rugi.

Terhadap korban yang secara sengaja membiarkan dirinya menjadi korban atau mereka yang melibatkan dirinya dalam suatu kejahatan yang menyebabkan mereka menjadi korban dalam kejahatan tersebut adalah mereka-mereka yang termasuk kelompok/tipologi korban yang tidak layak untuk memperoleh ganti rugi dari negara. Sebaliknya bagi mereka yang menjadi korban dari suatu kejahatan lainnya perlu mendapatkan perlindungan pemerintah/negara dengan jalan memberikan dana kompensasi korban.

Selain korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, pemerintah/negara juga perlu memberikan perhatian terhadap mereka-mereka yang menderita akibat dari upaya pencegahan terjadinya tindak pidana serta mereka-mereka yang menderita akibat membantu aparat penegak hukum

---

<sup>89</sup> Iswanto, *Ed, Viktimologi*, Cet. I, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1998, hal. 70.

dalam penanggulangan tindak pidana serta dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana.

Pemberian ganti rugi (kompensasi) perlu dilakukan terhadap orang-orang yang menderita akibat membantu pemerintah dalam rangka pencegahan/penanggulangan tindak pidana atau dalam rangka menemukan dan menangkap pelaku tindak pidana, mengingat sangat terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan aparat yang menjaga ketertiban serta keamanan dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga keamanan perlu mendapat dukungan dan perlindungan dari pemerintah.

Persoalan lain yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana adalah menyangkut pertanyaan apakah perlindungan hukum kepada korban sudah cukup dengan mengatur pemberian ganti rugi (restitusi maupun kompensasi) dan rehabilitasi seperti yang telah diatur di dalam hukum pidana positif dan seperti yang ada dalam Konsep Rancangan KUHP yang ada sekarang, ataukah masih memerlukan perlindungan hak-hak lainnya bagi korban.

Dalam menjawab permasalahan tersebut di atas, perlu dipikirkan kembali mengenai bentuk-bentuk kerugian atau penderitaan yang dapat diberikan perlindungan melalui atau dengan hukum pidana, karena tidak semua kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban dapat ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana. Hal ini juga berkaitan dengan apa yang menjadi hak maupun kewajiban dari si korban.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Arif Gosita mengemukakan adanya beberapa hak dan kewajiban dari orang yang menjadi korban suatu tindak pidana. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah:<sup>90</sup>

Hak-hak korban:

- si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delikueni dan penyimpangan tersebut;
- berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
- berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- berhak mendapat kembali hak miliknya;
- berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- berhak mendapatkan penasehat hukum;
- berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Kewajiban korban adalah:

- tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);

<sup>90</sup> Arif Gosita, Op. Cit. Hal. 52-53.

- berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- ikut serta membina pembuat korban;
- bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa;
- menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Dari beberapa hak dan kewajiban korban yang di sebutkan di atas, maka dapat dilihat adanya beberapa hak dan kewajiban dari si korban yang tidak dapat dituangkan dalam kebijakan hukum pidana antara lain:

- hak untuk memperoleh pembinaan;
- hak untuk menolak menjadi saksi;
- hak untuk mempergunakan upaya hukum.

Hak-hak tersebut diatas tidak dapat dituangkan di dalam kebijakan hukum pidana karena akan bertentangan dengan proses dan prosedur dalam sistem peradilan pidana. Misalnya dalam hal apa seorang pelaku tindak pidana (pembuat korban) harus membina korban. Demikian juga halnya dengan hak untuk menolak menjadi saksi dan hak untuk mempergunakan upaya hukum,

jika hak ini dituangkan dalam kebijakan hukum pidana akan menyulitkan aparat penegak hukum di depan sidang pengadilan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan untuk membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Sebaliknya jika si korban diberi hak untuk mempergunakan upaya hukum, maka hal ini akan bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang ada sekarang dimana si korban telah diwakili oleh negara. Maka kepentingan-kepentingan korban akan diperjuangkan oleh negara melalui petugas penyidik dan penuntut umum yang sekaligus juga mewakili masyarakat umum yang keamanan dan ketenangannya telah terganggu oleh adanya tindak pidana, dan dengan demikian dalam proses peradilan pidana di Indonesia tidak memungkinkan untuk memberikan hak untuk mempergunakan upaya hukum kepada korban.

Dengan melihat proses peradilan pidana sekarang yang tidak memberikan tempat bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya, maka untuk masa yang akan datang perlu dikembangkan suatu kebijakan yang memberikan kemungkinan kepada korban untuk mendapatkan perlindungan yang wajar dalam proses peradilan pidana. Berkaitan dengan hal ini, menurut Mardjono Reksodiputro<sup>91</sup> "pertama-tama harus diciptakan suatu iklim dimana korban mau melaporkan nasibnya dan bebas dari kemungkinan tekanan-tekanan ataupun ketakutan untuk melapor. Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,<sup>92</sup> dalam hal korban akan membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk

<sup>91</sup> Mardjono Reksodiputro; Op.Cit. hal. 92.

<sup>92</sup> Barda Nawawi Arief; Op.Cit. 1998, hal. 67.

memperoleh bantuan hukum (penasehat hukum) secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk korban yang mengalami penderitaan secara psikis, harus pula tersedia fasilitas untuk menampung “pengobatan” mereka. Khusus bagi mereka yang mengalami tekanan bathin (korban perkosaan atau penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan oleh ahli-ahli.

Dari semua apa yang diuraikan di atas, ternyata bahwa dalam perkembangan akhir-akhir ini baik secara nasional maupun internasional, hak-hak atau kepentingan korban mendapat perhatian yang besar dan oleh karena itu dalam kebijakan hukum pidana (KUHP) Indonesia kedepan, hak-hak korban harus betul-betul mendapat perhatian guna menjamin adanya pemerataan keadilan dalam masyarakat. Perhatian terhadap kepentingan korban sudah barang tentu dengan tetap memperhitungkan keterlibatan korban dalam suatu tindak pidana dan dengan demikian perhatian terhadap korban tidak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana, serta tidak akan menyebabkan terabaikannya perhatian dan pembinaan terhadap pelaku serta pentingnya perlindungan terhadap masyarakat.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan.

Dari seluruh rangkaian tulisan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjawab permasalahan pertama dapat dikemukakan sebagaiberikut:

a. Ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam KUHP belum mencerminkan adanya perhatian terhadap perlindungan korban.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana yang ada dalam KUHP hanyalah perlindungan yang bersifat abstrak yaitu perlindungan umum kepada masyarakat (korban potensial) Adanya kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban yang diatur dalam Pasal 14c ayat (1) tidaklah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada korban melainkan agar terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat/pidana percobaan tidak menjalani pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh hakim.

b. Usaha untuk memberikan perhatian pada korban telah mulai terlihat dalam kebijakan legislatif/formulasi hukum pidana positif di Indonesia sejak mulai diciptakannya/diberlakukannya undang-undang tindak pidana khusus, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955), Undang-undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999), Undang-undang No 23 tahun 1997, Undang-undang No. 8 tahun 1999 serta dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000.

- c. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan legislatif/formulasi hukum pidana positif saat ini dalam hal-hal tertentu (yaitu dalam tindak pidana khusus) telah mulai memperhatikan kepentingan korban tetapi di dalam KUHP yang menjadi induk hukum pidana belum mengatur kepentingan korban, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan pidana secara umum belum memberikan perhatian pada kepentingan korban.

2. Kebijakan aplikatif/yudikatif saat ini masih kurang memberikan perhatian pada kepentingan korban terutama yang menyangkut ganti rugi atau memperbaiki segala kerusakan akibat dari tindak pidana. Hal ini terlihat dari kurangnya bahkan dapat dikatakan sangat sedikit putusan hakim yang memerintahkan untuk membayar ganti rugi kepada korban. Ganti rugi yang ada dalam putusan hakim selama ini diberikan kepada korban karena ada gugatan dari korban sendiri melalui permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, jadi bukan karena inisiatif hakim berdasar kewenangannya untuk memberikan ganti rugi kepada korban (individual). Selain itu ganti rugi atau perintah membayar uang pengganti untuk korban kolektif-pun (untuk negara) hanya sedikit yang



dituangkan dalam kebijakan yudikatif/aplikatif. Kurang adanya perhatian terhadap kepentingan korban khususnya dalam hal memberikan ganti rugi pada korban dalam kebijakan yudikatif/aplikatif tidak terlepas dari kurangnya perhatian terhadap korban di dalam kebijakan legislatif/formulatif khususnya dalam KUHP yang berlaku sekarang.

3. Perlindungan korban dimasa yang akan datang akan terus mendapat perhatian baik dari para ilmuwan maupun dari pemerintah. Hal ini sejalan besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan korban kejahatan. Oleh karena itu maka ruang lingkup perlindungan korban yang perlu dituangkan dalam kebijakan legislatif dimasa yang akan datang meliputi fisik (materil) maupun perlindungan psichis (moril) dengan memberikan pelayanan/rehabilitasi kepada korban. Secara konkrit hal-hal tersebut sebagai berikut:

- a. pengaturan pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban;
- b. pengaturan pemberian ganti rugi oleh negara kepada korban;
- c. penggunaan pidana denda untuk kepentingan korban;
- d. pengaturan pembayaran ganti rugi kepada korban dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan pelaku;
- e. pengaturan tentang hak dan kewajiban korban;
- f. pembentukan lembaga perlindungan korban baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat/swasta;

## B. Saran.

1. Alasan KUHP yang berlaku sekarang, tidak diatur mengenai ganti rugi sebagai salah satu jenis pidana . Hal ini menyebabkan tidak adanya kemungkinan bagi korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan orang-orang yang menderita akibat dari suatu tindak pidana, maka perlu diadakan pembaharuan ketentuan pidana yang ada dalam KUHP. Pembaharuan yang mungkin dilakukan untuk saat sekarang adalah dengan mengadakan perubahan secara parsial terhadap ketentuan yang ada baik dengan mengadakan perubahan redaksi maupun isi pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis pidana dengan menambahkan ganti rugi sebagai salah satu jenis pidana tambahan.
2. Dalam kebijakan yudikatif/aplikatif hukum pidana sekarang terlihat kurang adanya perhatian pada kepentingan korban. Oleh karena itu disarankan kepada para hakim untuk lebih banyak memberikan perhatian pada kepentingan para korban apabila akan menjatuhkan pidana percobaan/pidana bersyarat dengan cara selalu menetapkan adanya syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian disamping adanya syarat-syarat umum.
3. Sesuai dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, dimana kepentingan korban tindak pidana semakin mendapat perhatian, maka Bangsa Indonesia yang memiliki Sila Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab, dalam kebijakan legislatif yang akan datang hendaknya memberikan perhatian yang besar terhadap kepentingan korban. Hal yang perlu mendapat perhatian terutama dalam rangka menghadapi pembahasan terhadap Konsep Rancangan KUHP Nasional yang baru.

- adanya kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa ganti rugi untuk korban terhadap semua delik yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.
- Kompensasi yang harus dibayarkan oleh negara apabila ganti rugi tidak mungkin diperoleh dari pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung. Alumni. Tanpa Cetakan.
- Adji, Oemar Seno, 1976, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Jakarta, Erlangga : Cetakkan kedua.
- Andi Hamzah. ed. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.
- \_\_\_\_\_. 1991a. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Cetakan ketiga.
- \_\_\_\_\_. 1991.b. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. Cetakan pertama.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Penjelasannya*. Jakarta : Pradnya Paramita. Cetakan ketujuh (Edisi revisi).
- \_\_\_\_\_. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. Cetakan kedua (Edisi revisi).
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Jakarta : Akademika Persindo. Cetakan pertama (Edisi pertama).
- \_\_\_\_\_. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa cetakan)*. Jakarta : Ind-Hill-Co. Cetakan pertama.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Viktimologi dan KUHP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta : Akadeemika Persindo. Cetakan ketiga.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Seri Hukum Pidana 1, Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.
- Atrmasasmita, Romli, 2001, *"Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum"*, Mandar Maju, Bandung.
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung. ed. 1977. *Penegakan Hukum Dalam Menyukkseskan Pembangunan*. Bandung : Alumni. Cetakan pertama.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Unndangan Indonesia*. Jakarta : Ind-Hill. Co. Cetakan ppertama.

Bambang Poernomo. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cetakan kelima.

Barda Nawawi Arief. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994.

\_\_\_\_\_. 1996a. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_. 1996b. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cetakan kedua (Edisi kedua).

\_\_\_\_\_. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti. Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_. 2000. "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.

\_\_\_\_\_. 2001. "Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana", Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.

Bismar Siregar. 1992. *Islam dan Hukum*. Jakarta : PT Grafikatama. Cetakan ketiga.

Departemen Kehakiman. Naskah Rancangan KUHP (Baru) Buku Kesatu dan Kedua serta Penjelasannya, Disusun Oleh Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992; Diisempurnakan Oleh Tim Kecil Sampai Dengan 13 Maret 1993.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta : Balai Pustaka. Cetakan pertama.

E. Utrecht. 1994. *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II, Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Hukum I Suatu Pembahasan Pelajaran Umum KUH Pidana Tahun 1946 Dari Pasal 55 sampai Dengan Akhir Buku I dan Hukum Penitensier, Dengan Sebuah Suplemen*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas. Tanpa cetakan.

Gorys Keraf. 1993. *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores : Nusa Indah. Cetakan kesembilan.

- H.A. Djazuli. 1996. *Fiqh Jinayah. (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam )*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Cetakan pertama.
- Hilman Hadikusuma. 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung : Alumni. Cetakan kedua.
- I.S. Susanto. *Perkembangan Pandangan Statistik Kriminal*. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung-Ambarawa, Tanggal 14 sampai dengan 30 Nopember 1994.
- \_\_\_\_\_. 1995a. *Kriminologi*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tanpa cetakan.
- \_\_\_\_\_. 1995b. *Kejahatan Korporasi*. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro. Cetakan pertama.
- Israel Drapkin and Emilio Viano. ed. 1975. *Victimology*. Canada : D.C. Health and Company. Second printing.
- Iswanto. 1995. "*Restitusi Kepala Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas*", Disertasi Dalam Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.
- Iswanto, Yazid Effindu dan Angkasa. 1998. *Viktimologi*. Purwokerto : Penerbit Universitas Jenderal Soedirman. Cetakan pertama.
- J.E. Sahetapy. ed. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Cetakan pertama.
- \_\_\_\_\_. "*White-Collar Crime ; Suatu Perspektif Viktimologi*, JIIS (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial), Edisi Januari 1994.
- \_\_\_\_\_. ed. 1995. "*Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*". Bandung : PT Eresco. Cetakan pertama.
- Jimly Asshiddiqie, 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHPNasional*. Bandung : Angkasa. Cetakan pertama (Edisi pertama).
- Karni Ilyas. 1996. *Catatan Hukum*. Jakarta : Penerbit Yayasan Karyawan Forum. Cettakan pertama.
- Kartono. 1972. *Peradilan Bebas*. Jakarta : Pradnya Paramita. Cettakan pertama.

Kompas, Edisi Tanggal 6 Noopember 1996.

K. Wantjik Saleh. 1985a. *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita. Cetakan ketiga.

\_\_\_\_\_. 1985b. *iPelengkap KUHP, Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana Sampai Dengan Akhir 1980*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cetakan kelima.

Laporan Seminar Kriminologi Ke-3 Diselenggarakan Atas Kerjasama Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 1979 di Semarang.

Leden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan pertama.

L.H.C. Hulsman. 1988. *Afscheid Van Het Strafrecht Een Pleidooi Voor Zelfregulering*, atau *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa. Regulasi*, iterj. Wonosutanto, Surakarta : Forum Studi Hukum Pidana. Jilid kedua. Cetakan pertama.

Machrup Elrick. ed. 1995. *Kapita Selekta Hukum, Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.* Jakarta : Ghalia Indonesia. Cetakkan pertama.

Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan pertama.

Mardjoono Reksodiputro. 1994a. *Kemajuan Pengembangan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta : Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Cetakan pertama (Edisi pertama).

\_\_\_\_\_. 1994b. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Cetakan pertama (Edisi pertama).

\_\_\_\_\_. 1994c. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Cetakan pertama (Edisi pertama).

\_\_\_\_\_. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Cetakan pertama (Edisi pertama).

- M. Hanafi Asmawie. 1985. *Ganti Rugi dan rehabilitasi Menurut KUHAP, Uraian Singkat Tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Jakarta : PT Pradnya Paramita. Cetakan pertama.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara. Cetakan ketiga.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Cetakan keempetbelas.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. Cetakan keempat.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni. Tanpa cetakan.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cetakan pertama.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Hak Asasi manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas diponegoro, Cetakan pertama.
- \_\_\_\_\_. "Prinsip—Prinsip dasar hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya Dengan Undang—Undang Nomor 23 Tahun 1997" *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume I/Nomor I/1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992a. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni. Cetakan kedua (Edisi Revisi).
- \_\_\_\_\_. 1992b. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. Cetakan pertama.
- Mulyana W. Kusumah. 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung. Alumni. Tanpa cetakan.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Pustaka Kartini. Cetakan ketiga (Jilid I dan II).
- Ninik Widyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta : Bina Aksara. Cetakan pertama.
- Noeng Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta Rake Sarasin. Cetakan ketujuh (Edisi ketiga).



Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta. Erlangga. Tanpa cetakan.

\_\_\_\_\_. 1984. *Herziening Ganti Rugi, Suap dan Perkembangan Delik*. Jakarta : Erlangga. Cetakan kedua.

\_\_\_\_\_. 1989. *KUHAP Sekarang*. Jjakarta : Erlangga. Cetakan kedua.

Padmo Wahjono. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.

P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung. Armico. Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Cetakan ketiga.

Panda nababan dan R.M. Suropto. ed. 1988a. *Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadillan (Diangkat dari Diskusi Pemikir Hukum Indonesia dengan topik "Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum"*, Tanggal 18 Juli 1988. Jakarta. Yayasan Keadilan. Cetakan pertama.

Philipus M. Hadjon. "Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila", *Dinamika Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Jenderal soedirman, Nomor 2 Tahun I. Edisi Oktober 1996.

Resolusi Majellis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 Tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Diterjemahkan dan Diperbanyak ooleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM.

Roëslan Saleh. 1983 a. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_. 1983b. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta : Aksara Baru. Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_. 1984. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.

\_\_\_\_\_. 1987a. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Jakarta. Aksara Baru. Cetakan ketiga.

- \_\_\_\_\_. 1987b. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru. Cetakan kelima.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. Cetakan pertama.
- Romli Atmasasmita. 1992a. "Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana", *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*.
- \_\_\_\_\_. 1992b. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : PT Eresco. Cetakan pertama.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung : Binacipta. Cetakan kedua (Edisi revisi).
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1989. *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman-Pemahaman Masalah Hukum*. Semarang. Agung Press. Tanpa Cetakan.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia . Cetakan keempat.
- Sahetapy, J.E. dkk., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco, Cetakan pertama.
- Sanford H. Kadish. 1983. *Encyclopedia of Crime and Justice*. Vol. 4. New York : A Division of Macmillan, Inc.
- Satjipto Rahardjo. 1977. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Hukum*. Bandung. Alumni. Tanpa Cetakan.
- \_\_\_\_\_. "Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial Bagi Pengembangan Hukum. Bandung. Alumni. Tanpa cetakan.
- Satochid Kartanegara. Tanpa Tahun Terbit. *Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia Dari Bahasa Belanda, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka* (Bagian satu dan dua). Penerbit Balai Lektur Mahasiswa.
- Schaefer, Stephen, 1968, *The Victim and his Criminal a Study in Functional Responsibility*, Random House, Northeastern University.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta. Kurnia Esa. Cetakan kedua.